LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)

KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019

SEKRETARIAT DAERAH KAB. ROTE NDAO
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu, sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan capaian kinerja Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dijabarkan melalui program-program pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan menjadi umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berisi tentang analisis pencapaian sasaran serta pengukuran

atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 untuk tahun pelaksanaan 2019.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap dan sempurna. Untuk itu, semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menjadi media informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja demi pencapaian dan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Ba'a, 11 Maret 2019

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING – BULLU, SE

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government)* sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Tahun 2019 merupakan tahun akhir periode perencanaan 5 (lima) tahunan (RPJMD 2014-2019), maka seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019, secara umum tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 dapat tercapai dengan baik, dari 30 sasaran yang mencakup 65 indikator sasaran, rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **123,50%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Babupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019,

untuk mewujudkan Visi **"Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT yang Bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan"** telah ditetapkan 6 Misi yaitu :

1) Mewujudkan Tata Ruang Wilayah ke dalam unit-unit Operasional Yang Tepat Dari Sisi Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan Negara;
2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur;
3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan;
5) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
MISI I	**MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH KE DALAM UNIT-UNIT OPERASIONAL YANG TEPAT DARI SISI EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN KEAMANAN NEGARA**		
1.	Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sesuai Kaidah Tata Ruang	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Daya Dukung Lahan	97,16	Sangat Berhasil
3	Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman Layak Huni Dan Produktif	158	Sangat Berhasil

MISI II	**MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SERTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**		
4.	Tersedianya Sarana dan Prasrana Transportasi Publik Yang memadai Secara Kualitas & Kuantitas	98,78	Sangat Berhasil
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jaringan Irigasi Teknis	123,58	Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih dan Sanitasi Layak	78,05	Berhasil
MISI III	**MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING**		
7.	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	99,95	Sangat Berhasil
8.	Meningkatnya Mutudan Prosentase Kelulusan	100	Sangat Berhasil
9.	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Non Formal	100,43	Sangat Berhasil
10.	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Perpustakaan	100	Sangat Berhasil
11.	Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan	100	Sangat Berhasil
12.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	100	Sangat Berhasil
13.	Meningkatnya Perlindungan Anak	100	Sangat Berhasil
14.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dalam Segala Bidang baik Lokal, Regional Maupun Nasional	85,00	Berhasil
MISI IV	**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DI DUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN**		
15.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertaniandan Perikanan	93,92	Sangat Berhasil
16.	Meningkatnya Sarana dan Prasaran Pariwisata	280,45	Sangat Berhasil

17.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	105,06	Sangat Berhasil
18.	Meningkatnya Jumlah Industri Berbasis Pertanian	523,08	Sangat Berhasil
19.	Meningkatnya Jumlah dan Mutu Koperasi yang sehat	102,82	Sangat Berhasil
MISI V	**MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**		
20.	Menurunnya Gizi Buruk	76,31	Berhasil
21.	Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit	82,01	Berhasil
22.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB	91,20	Sangat Berhasil
23.	Meningkatnya Jumlah dan Mutu Tenaga Medis dan Paramedis	154,80	Sangat Berhasil
24.	Menurunnya Angka Kemiskinan	104,26	Sangat Berhasil
25.	Menurunnya Angka Pengangguran	103,53	Sangat Berhasil
MISI VI	**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**		
26.	Meningkatnya Kinerja Aparatur sesuai Prinsip-prinsip *Good Governance*	98,67	Sangat Berhasil
27.	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	100	Sangat Berhasil
28.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Pembangunan	138,60	Sangat Berhasil
29.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	109,32	Sangat Berhasil
30.	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	100	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		**123,50**	**Sangat Berhasil**

Berdasarkan ketercapaian setiap indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, maka hasil pencapaian indikator sasaran sebanyak 30 (tiga puluh) sasaran dengan 65 (enam puluh lima) indikator kinerjamenunjukan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 sebesar **123,50%** sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**, yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) indikator sasaran dikategorikan **Sangat Berhasil** dan sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran dikategorikan **Berhasil**. Hal ini menunjukan bahwa apa yang telah ditargetkan dalam RPJMD, RKPD maupun APBD serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019 di Kabupaten Rote Ndao terlaksana dengan baik sesuai target yang diharapkan. Keberhasilan atas pencapaian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Iktisar iii
Eksekutif
Daftar Isi viii
Bab I Pendahuluan..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 3
C. Gambaran Umum 4
D. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.. 14
E. Pemerintahan 16
F. Dasar Hukum 21
G. Sistimatika Laporan 22
Bab II Rencana Strategis dan Perjanjian Kerja 25
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 27
B. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 52
Bab III Akuntabilitas Kinerja 65
A. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao..... 65
B. Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 175
C. Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao..... 178
Bab IV P e n u t u p 181

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kwalitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Bupati Rote Ndao selaku Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan berkewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang diterima kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019, sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, trasparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good*

Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun RPJMD Kabupaten Rote Ndao. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rote Ndao, pada arah Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting bagi masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2019.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan dijelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mempunyai 2 (dua) maksud utama yaitu :

Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan Masyarakat).

Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 berpatokan pada 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Rote Ndao atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama tahun 2019.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik tehadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, agar kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. GAMBARAN UMUM

1. KONDISI GEOGRAFIS

Secara astronomis Kabupaten Rote Ndao terletak pada posisi paling selatan Wilayah Nusantara yaitu antara 10°25’ LS - 11°15’ LS dan 121°49’ BT - 123°26’ BT. Dengan batas-batas wilayah : Sebelah Utara - Laut Sawu, Sebelah Selatan - Samudera Hindia, Sebelah Timur - Selat Pukuafu, Sebelah Barat - Laut Sawu.

Wilayah Rote Ndao beriklim kering yang dipengaruhi oleh angin muson. Periode musim kemarau lebih panjang, yaitu 7 bulan (Mei sampai dengan Nopember) sedangkan musim hujan hanya 5 bulan (Desember sampai dengan April). Suhu udara rata-rata 27^{o}C, suhu maksimum rata-rata 29^{o}C kadang-kadang mencapai 32^{o}C, suhu minimum rata-rata 26,1^{o}C, curah hujan rata-rata 114,1 mm, kelembaban udara rata-rata 84,4 %, kecepatan angin rata-rata 9,2 knot dan tekanan udara rata-rata 1008,5 milibar.

Luas wilayah laut Kabupaten Rote Ndao sekitar 2.376 km^{2} dengan panjang garis pantai 330 km, menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Rote Ndao merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 107 pulau, 8 Pulau telah berpenghuni dan 99 Pulau belum berpenghuni dengan topografi bervariasi dari datar 35% (45.250 ha), perbukitan 25% (32.625 ha), lainnya 40% (50.135 ha), kemiringan rata-rata 45^{o} dan ketinggian 0 - 1.500 m diatas permukaan laut.

Tabel 1.1
Persentase Luas Daerah Rote Ndao
Menurut Kacamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
01.	Rote Barat Daya	114,57	8,95
02.	Rote Barat Laut	172,40	13,47
03.	Lobalain	145,70	11,38
04.	Rote Tengah	162,50	12,69
05.	Rote Selatan	73,38	5,73
06.	Pantai Baru	176,18	13,76
07.	Rote Timur	110,84	8,66
08.	Landu Leko	194,06	15,16
09.	Rote Barat	116,28	9,08
10	Ndao Nuse	14,19	1,11
Jumlah		**1.280,10**	**100,00**

Sumber : Rote Ndao Dalam Angka Tahun 2020

2. KONDISI DEMOGRAFIS

Salah satu modal dasar dalam pembangunan adalah penduduk. Jumlah penduduk Rote Ndao tahun 2019 sebesar 172.104 jiwa terdiri dari 87.380 laki-laki dan 84.724 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk Rote Ndao sebesar 134 jiwa per km^2 dan laju pertumbuhan penduduk per-tahun mencapai 30,33% lebih tinggi jika dibandingkan angka nasional yang mencapai 1,49 persen dan berkecenderungan meningkat.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

No	Kelompok Umur (Tahun)	Persentase Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	11.083	10.950	22.033
2	5 – 9	9.371	9.498	18.869
3	10 – 14	7.987	7.864	15.851
4	15 – 19	8.130	7.666	15.796
5	20 – 24	8.404	7.312	15.716
6	25 – 29	7.128	6.485	13.613
7	30 – 34	6.034	5.532	11.566
8	35 – 39	4.756	4.754	9.510
9	40 – 44	4.370	4.198	8.568
10	45 – 49	4.168	4.194	8.362
11	50 – 54	4.032	3.781	7.813
12	55 – 59	3.759	3.944	7.703
13	60 – 64	3.056	2.938	5.994
14	65 – 69	2.028	2.173	4.201
15	70 – 74	1.478	1.581	3.059
16	75+	1.596	1.854	3.450
	Jumlah	**87.380**	**84.724**	**172.104**

Sumber : BPS Kabupaten Rote Ndao 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dominasi penduduk Rote Ndao berada pada usia muda. Hal ini dimungkinkan karena tingkat vertilitas dan mortalitas yang masih tinggi atau memiliki angka harapan hidup yang masih tergolong rendah. Dilihat dari rasio jenis kelamin menunjukan penduduk laki-laki di Rote Ndao lebih tinggi

dari pada jumlah penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 103 artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki 3 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Rote Ndao
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah		Total Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Rote Barat Daya	14.302	14.027	28.329	247	102
2	Rote Barat Laut	16.250	16.201	32.451	188	100
3	Lobalain	18.387	17.190	35.577	244	107
4	Rote Tengah	5.906	5.659	11.565	71	104
5	Rote Selatan	3.760	3.664	7.424	101	103
6	Pantai Baru	9.071	8.722	17.793	101	104
7	Rote Timur	8.818	8.538	16.356	157	103
8	Landu Leko	3.346	3.171	6.517	34	106
9	Rote Barat	5.412	5.246	10.658	92	103
10	Ndao Nuse	2.128	2.306	4.434	312	92
Jumlah		**87.380**	**84.724**	**172.104**	**134**	**103**

Sumber: Rote Ndao Dalam Angka 2020

Penyebaran penduduk di Rote Ndao belum merata dan masih terkosentrasi pada tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lobalain (20,67 persen), Kecamatan Rote Barat Laut (19,00 persen) dan Kecamatan Rote Barat Daya (16,00 persen). Sedangkan daerah yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Ndao Nuse (2,58 persen) dan Kecamatan Landuleko (3,79 persen). Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk terlihat Kecamatan Ndao Nuse sebagai daerah paling padat dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 312 jiwa per km^2 sedangkan Kecamatan Landuleko dan tingkat kepadatan yang paling kecil 3 jiwa per km^2.

3. KONDISI EKONOMI

Pada tahun 2017 Perekonomian Rote Ndao tumbuh sebesar 5,42%, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi melaju sebesar 5,42%, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 5,23%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi karena ada beberapa sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 5,23%, hal ini terjadi karena Produk Domestik Regional Bruto dari aspek kuantitas mengalami peningkatan.

Angka pertumbuhan ekonomi Rote NdaoTahun 2019 masih didominasi sektor pertaniandengan pertumbuhan sebesar 4,26%. Hal ini disebabkan besaran kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 47,11%. Selain sektor pertanian terdapat dua sektor yang mempunyai kontribusi yang cukup besar yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan angka pertumbuhan sebesar 8,07% dengan kontribusi sebesar 13,79% dan sektor Jasa Pendidikan dengan angka pertumbuhan sebesar 5,64% dengan kontribusi sebesar 12,92%, sedangkan sektor-sektor yang lain kontribusinya masih dibawah 7,00%.

Kondisi struktur perekonomian, relatif belum mengalami perubahan signifikan, meskipun *trend* pergeseran sudah mulai nampak. Dalam sepuluh tahun terakhir, struktur ekonomi Rote Ndao tetap bergantung kepada tiga sektor utama, yaitu: pertanian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan jasa. Namun bila melihat perkembangannya, sektor pertanian cenderung terus menurun.

Namun demikian, apabila penurunan sektor pertanian diikuti dengan peningkatan sektor industri, hal tersebut mengindikasikan sentimen positif. Nyatanya tidak demikian yang terjadi di Rote Ndao. Sektor industri masih belum menunjukan tanda-tanda peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil pertanian belum diolah secara optimal, namun hanya diperdagangkan tanpa diberikan nilai tambah terlebih dahulu.

Kebijakan Pengembangan Program Lakamola Anansio yang difokuskan pada pengembangan ekonomi produktif berpeluang meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian. Peningkatan pembangunan sektor pertanian berpeluang meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Rote Ndao pada tahun 2019.

4. KONDISI KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Rote Ndao mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bukan disebabkan menurunnya jumlah pekerja namun lebih dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk bukan angkatan kerja seperti anak sekolah, ibu rumah tangga dan lainnya. Pada tahun 2018 TPAK penduduk Rote Ndao mencapai 72,98% berarti terdapat 27,02% penduduk usia kerja di Rote Ndao yang tidak atau belum berminat masuk dalam dunia kerja.

Tabel 1.4
Statistik Ketenagakerjaan Rote Ndao 2015-2019

No	Uraian	2018	2019
1	TPAK (%)	72,98	69,46
2	Tingkat pengangguran (%)	2,11	2,73
3	Bekerja (%)	97,89	97,27
4	UMP (000 Rp)	1.795	1.950
5	Sektor Pekerjaan - Primer (%) - Sekunder (%) - Tersiar (%)	 48,95 23,80 27,25	 50,36 20,15 29,49
6	Status Pekerjaan - Formal - Informal	 21,87 78,13	 28,14 71,86

Sumber: BPS kabupaten Rote Ndao 2020

5. KONDISI PENDIDIKAN

Peranan pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sangat besar dalam menghadapi laju perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Sektor pendidikan selalu menjadi perhatian pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan dimana pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas dan kesejahteraan rakyat disuatu wilayah. Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar yang diselenggarakan pemerintah merupakan salah satu program pendidikan yang bertujuan untuk mencapai pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Tingkat keberhasilan program ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menunjukan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah di Rote Ndao dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, data statistik menunjukan tahun 2015 APS kelompok umur 7-12 tahun sebanyak 96,80% pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 98,90% pada tahun 2019. Pada kelompok umur 13-15 tahun 2015 sebanyak 77,59% meningkat

menjadi 98,90% pada tahun 2019. Pada kelompok umur 16-18 tahun 2015 sebanyak 90,04% menjadi 76,90% pada tahun 2019 dan kelompok umur 18–24 tahun meningkat dari 0,00% pada tahun 2015 menjadi 76,66% tahun 2019 karena telah menyelesaikan pendidikan.

Indikator pendidikan lainnya yang dipakai untuk melihat kualitas pendidikan suatu wilayah adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini menunjukan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Sesuai data Susenas rata-rata lama sekolah penduduk Rote Ndao usia 15 tahun keatas pada tahun 2015 yaitu 6,45 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 7,29, hal ini menunjukan bahwa penduduk Rote Ndao baru mampu menempuh sekolah sampai tamat Sekolah dasar dan atau putus sekolah pada jenjang kelas 1 SMP.

Tabel 1.5
Indikator Pendidikan Kabupaten Rote Ndao
2018 dan 2019

No	Uraian	2018	2019
1	Angka Partisipasi Sekolah (%)		
	- 7 - 12	98,84	98,90
	- 13- 15	93,59	93,57
	- 16 - 18	76,90	76,66
	- 18-24	23,93	-
2	Angka Partisipasi Murni (%)		
	- SD	84,32	84,27
	- SMP	60,79	62,76
	- SMA	50,63	49,92
3	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	7,24	7,29

Sumber: Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2020

6. KONDISI KESEHATAN

Salah satu faktor pendukung utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang berkualitas. Data statistik menunjukan bahwa puskesmas/pustu merupakan tempat rujukan utama bagi masyarakat Rote Ndao untuk berobat. Tahun 2019 yang berobat ke puskesmas/pustu 67,79 persen dan dibawah 10 persen yang rujukan ke fasilitas lainnya. Indikator kesehatan lainnya yang sama penting adalah penolong persalinan bayi dimana hal ini penting karena berkaitan dengan upaya penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu.

Upaya mendorong agar ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat dan bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan selamat dengan didampingi oleh tenaga kesehatan yang professional cukup berhasil dalam pembangunan kesehatan di Rote Ndao. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak juga persalinan yang dibantu oleh dukun. Kondisi ini juga selaras dengan kenyataan membaiknya Angka Harapan Hidup yakni 68,74.

Sedangkan angka kesakitan atau morbiditas di Rote Ndao masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi lama seperti ISPA, Malaria, Diare, TBC, Frambusia, Filariasis, Lepra dan penyakit infeksi yang baru seperti HIV/AIDS dan DBD. Tingkat kematian ibu juga merupakan masalah yang dominan di Rote Ndao. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kematian ibu antara lain : faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis, transportasi dan faktor kesehatan itu sendiri.

Faktor pendukung pembangunan kesehatan adalah peningkatan sarana prasarana kesehatan di Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 1.6 dan tabel 1.7 berikut ini :

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Kesehatan Di Rote Ndao Tahun 2019

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Rumah Sakit	1 Unit	Type D
2.	Puskesmas	12 Unit	
3.	Puskesmas Pembantu	78 Unit	
4.	Poskesdes	1 Unit	
5.	Polindes	7 Unit	
6.	Posyandu	381 Unit	
7.	Apotik	6 Unit	

Sumber : Rote Ndao dalam Angka 2020.

Tabel 1.7
Data Tenaga Pelayan Kesehatan di Rote Ndao Tahun 2018

No.	Tenaga Pelayan Kesehatan	J u m l a h	Keterangan
1.	Dokter Spesialis	5 orang	
2.	Dokter Umum	36 orang	
3.	Dokter Gigi	8 orang	
4.	Ahli Gizi	16 orang	
5.	Perawat Umum	180 orang	
6.	Perawat Gigi	15 orang	
7.	Bidan	173 orang	
8.	Farmasi	34 orang	
9.	Teknisi Medis	8 orang	
10.	Sanitasi	44 orang	
11.	Kesehatan Masyarakat	39 orang	
12.	Analis Kesehatan	577 orang	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020

7. KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA

Kemajuan pembangunan serta maju mundurnya suatu daerah sangat tergantung pada kwalitas sumber daya manusianya. Makin bermutu Sumber Daya Manusia (SDM) makin maju daerahnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan suatu bangsa dengan melihat 3 indikator utama yaitu pembangunan kesehatan (diwakili Angka Harapan Hidup), Pendidikan (diwakili oleh Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah dan ekonomi (diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan). IPM Rote Ndao tahun 2018 sebesar 61,51meningkat menjadi 62,22 pada tahun 2019. Peningkatan indeks ini mengindikasikan terjadi peningkatan pada Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup Layak di Kabupaten Rote Ndao. Jika diperbandingkan antar Kabupaten IPM Rote Ndao menempati urutan ke 17 berada di bawah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Selatan.

D. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.

Amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren dibagi berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, sehingga kewenangan daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunanya, manfaat, atau

dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yaitu :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi :
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
   f. sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
   a. tenaga kerja;
   b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   c. pangan;
   d. pertanahan;
   e. lingkungan hidup;
   f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
   h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   i. perhubungan;
   j. komunikasi dan informatika;
   k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
   l. penanaman modal;
   m. kepemudaan dan olahraga;
   n. statistik;

o. persandian;
p. kebudayaan
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pariwisata;
   c. pertanian;
   d. kehutanan;
   e. energi dan sumber daya mineral;
   f. perdagangan;
   g. perindustrian; dan
   h. transmigrasi.

E. PEMERINTAHAN.

1. WILAYAH ADMINISTRASI.

Ibu kota Kabupaten Rote Ndao adalah Kota Ba'a. Sejak dilakukannya pemekaran wilayah baik Kecamatan, Kelurahan maupun Desa, wilayah Administratif Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 10 Kecamatan yang terbagi dalam 112 Desa, 7 Kelurahan Definitif pada Tahun 2018.

Tabel 1.8
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018

No	Kecamatan	Ibu kota	Desa	Kelurahan	Desa + kelurahan
1	Rote Barat Daya	Batu Tua	19	-	19
2	Rote Barat Laut	Busalangga	21	1	22
3	Lobalain	Ba'a	15	3	18
4	Rote Tengah	Feapopi	7	1	8
5	Rote Selatan	Daleholu	7	-	7
6	Pantai Baru	Olafuliha'a	14	1	15
7	Rote Timur	Eahun	10	1	11

8	Landu Leko	Landu Leko	7	-	7
9	Rote Barat	Delha	7	-	7
10	Ndao Nuse	Ndao Nuse	5	-	5
Jumlah			**112**	**7**	**119**

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rote Ndao Dalam Angka 2020

2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Organisasi perangkat daerah dibentuk untuk menyelenggarakan kewenangan yang sesuai urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan mencacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, dengan susunan organisasi perangkat daerah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, yang terdiri dari :
   1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
   2. Bagian Hukum dan Perundang – Undangan.
   3. Bagian Perpustakaan dan Kearsipan.
   4. Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
   5. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
   6. Bagian Umum, Humas dan Protokol.
   7. Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;

c. Dinas, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
6. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
7. Dinas Komonikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social;

10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
12. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
13. Dinas Peternakan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan;
14. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
15. Dinas Pangan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masayarakat dan desa; dan

19. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
   1. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
   2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
   3. Badan Keuangan dan Aset merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan asset daerah;
   4. Badan Pendapatan merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah; dan
   5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

e. Lembaga Lain, terdiri dari :
   1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
   2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
   3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan.

g. Staf Ahli

F. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan pada :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Thun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun Sistimatika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum oragnisasi/kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, dasar hukum, serta sistimatika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai konsep dan perspektif yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao.

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao dan apa manfaat yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao tersebut.

C. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

D. Gambaran Umum

Menjelaskan secara singkat gambaran umum pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao, organisasi/kelembagaan serta tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

E. Tugas Pokok dan Fungsi

F. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao tahun 2018.

G. Sistematika Laporan

Menjelaskan mengenai sistematika keseluruhan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini diiktisarkan beberapa hal penting dalam perencanaanyaitu gambaran singkat mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019

1. Visi
2. Misi
3. Agenda Pembangunan Daerah
4. Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao
5. Strategi Arah kebijakan Pembangunan Daerah
6. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

B. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan akuntabilitas keuangannya.

A. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Pada Sub bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil.

B. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Pada Sub bagian ini disajikan ringkasan anggaran dan realisasi Anggaran tahun 2019 beserta rincian belanja perurusan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao tahun 2019.

LAMPIRAN

BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Di dalam RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Batasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (analog) dengan penetapan RPJM Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, yang substansinya merupakan rencana kerja lima tahun dan akan dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Rencana Jangka Panjang Daerah Periode II RPJMD atau tahap ketiga ini merupakan **Tahap Pemantapan**. Tahap pemantapan mengandung arti kemampuan menjaga dan meningkatkan kinerja pembangunan yang dicapai pada pembangunan sebelumnya dengan asas berkelanjutan. Tahap pemantapan ini juga mengandung arti percepatan untuk menuju kemandirian daerah yang berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan lebih lanjut rencana pembangunan daerah tersebut oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 sebagai garis kebijakan dan landasan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan di Kabupaten Rote Ndao maka strategi pembangunan yang dilaksanakan adalah dengan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kepentingan rakyat yang dikenal dengan slogan Lakamola Anansio yang sangat popular dimasyarakat Kabupaten Rote Ndao bukanlah slogan semata namun tekat ini telah dituangkan dalam program pembangunan di Kabupaten Rote Ndao dan sudah menjadi Produk Inovasi Daerah yang telah meraih Penghargaan sebagai TOP 99 Inovasi Daerah dan selanjutnya berhasil masuk nominasi dan meraih penghargaan sebagai TOP 40 Inovasi Daerah.

Kerja keras Bupati dan seluruh jajarannya baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa serta dukungan stakeholders telah membuahkan hasil. Pembangunan yang merakyat dan pembangunan yang merata serta pembangunan yang berkeadilan telah diterima dan dirasakan masyarakat Kabupaten Rote Ndao meski diakui keberhasilan itu belum sepenuhnya tercapai.

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapetn Rote Ndao Tahun 2014-2019 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

a. VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao peride 2014 - 2019 adalah : **"Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT yang Bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan".**

BERMARTABAT terdiri dari kata **Ber**tumbuh, **Ma**kmu**r**, **Ta**at dan Bersaha**bat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

- **BERTUMBUH :**
  - Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
  - Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.
- **MAKMUR / SEJAHTERA :**
  - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
  - Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
  - Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
  - Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➢ **TAAT** :

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➢ **BERSAHABAT** :

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui misi-misi sebagai berikut :

1) Mewujudkan Tata Ruang Wilayah ke dalam unit-unit Operasional Yang Tepat Dari Sisi Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan Negara.

Melalui misi ini Pemerintah ingin menunjukan bahwa Perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao harus selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013 – 2033, sehingga pemanfaatan ruang dapat dikendalikan sesuai kaidah-kaidah tata ruang

guna menjaga pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekologis baik di daratan maupun di lautan.

2) **Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.**

Melalui misi ini pemerintah daerah memandang peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kelayakan infrastruktur yang merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi geografis adalah aksesibilitas wilayah yang melahirkan ekonomi mudah, murah dan cepat. Konektivitas wilayah sebagai urat nadi pembangunan ekonomi daerah makin meningkat apabila di dukung dengan lancarnya akses masuk dan keluar dari dan ke Kabupaten Rote Ndao.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan rumah sehat dan layak huni, pelayanan listrik, air bersih dan sanitasi serta telekomunikasi yang sangat dibutuhkan.

3) **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.**

Melalui misi ini pemerintah ingin mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya saing dalam tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat harus selalu menjadi perhatian utama. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila SDM yang ada, memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetetif dan berdaya saing di era globalisasi.

4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan.

Melalui misi ini pemerintah daerah memandang perlu meningkatkan potensi terbesar dalam pengelolaan daerah pesisir dan laut lewat pengembangan pariwisata antara lain wisata bahari berupa kegiatan surfing, diving, snorkeling dan wisata budaya yang sangat cocok dan sangat digemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pembangunan pariwisata yang dimaksud mencakup seluruh aspek pembangunan baik tempat wisata maupun lingkungan sumber daya manusia sarana dan prasarana penunjang serta promosi wisata. Untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata daerah maka, orientasi seluruh kebijakan pembangunan yang terkait terutama sektor pertanian dan perikanan direorientasikan pada pengembangan agrowisata, ekowisata dan wanawisata.

Beberapa komoditas andalan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tanaman pangan, usaha perikanan, sadap dan pengolahan nira lontar, serta usaha peternakan. Diversifikasi produk dan turunannya dari komoditi andalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab kebutuhan pasar. Potensi sektor ini apabila dikelola dengan baik diharapkan mampu memberikan daya ungkit dan daya dorong dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, sebagai kabupaten terluar yang berbatasan dengan Negara Australia sekaligus memiliki kedekatan geografis dengan ibu kota propinsi, Kabupaten Rote Ndao

memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Besarnya potensi ekonomi dan potensi pasar yang dimiliki oleh daerah dan negara tetangga menjadi peluang untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam berbagai sektor terutama perdagangan, pengembangan industri, pengembangan pariwisata dan pembangunan perikanan dan kelautan.

5) **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.**

Melalui misi ini pemerintah daerah menekankan pada pembangunan kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dan penyuluhan pola hidup sehat, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.

Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan masalah pengangguran perlu dipacu dengan penyediaan dan penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses permodalan, serta peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, penekanan pada pemberdayaan dan keberpihakan terhadap keluarga dan kelompok marginal berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata sehingga melahirkan pengusaha mikro, kecil, menengah serta pengusaha besar yang kuat dan bermoral yang dapat berkompetisi pada level regional maupun level nasional.

6) **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.**

Melalui misi ini pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good government)* dan bersih *(clean government)* serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mampu memfasilitasi operasional dan evaluasi di lapangan maka dibutuhkan aparatur yang profesional. Pengembangan pelayanan publik perlu di dukung dengan sistem informasi terpadu yang menyediakan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan terkini untuk kepentingan pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang tepat dan dapat diakses oleh masyarakat.

2. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2014-2019. Tujuan-tujuan tersebut diambil dari masing-masing misi.

Keterkaitan antara misi, dengan tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. **Mewujudkan Tata Ruang Wilayah ke dalam unit-unit Operasional Yang Tepat Dari Sisi Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan Negara.**

Tujuan :

1) Peningkatan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang;
2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
3) Percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.

Tujuan :

Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur.

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Tujuan :

1) Meningkatkan mutu dan akses pendidikan Formal dan Non formal;
2) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan;
3) Peningkatan kesejahteraan anak;
4) Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga; dan
5) Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat.

d. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan.

Tujuan :

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2) Meningkatkan potensi dan daya saing daerah; dan
3) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan baru *(Agropolitan dan Minapolitan)*.

e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Tujuan :

1) Peningkatan Derajat kesehatan masyarakat;
2) Percepatan penurunan kemiskinan; dan
3) Penurunan Angka Pengangguran.

f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

Tujuan :

1) Peningkatan tata kelola Kepemerintahan yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance*;
2) Peningkatan perlindungan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;
3) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
4) Peningkatan pelaksanaan SPM;
5) Terciptanya stabilitas Daerah yang kondusif;
6) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
7) Peningkatan Kapasitas pembangunan daerah.

3. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka pemerintah melaksanakan 6 (Enam) misi pembangunan daerah yang akan ditempuh melalui berbagai Strategi Pembangunan Daerah, yaitu:

a. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah ke dalam unit-unit Operasional Yang Tepat Dari Sisi Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan Negara.

Melalui misi ini pemerintah menetapkan beberapa strategi pokok yaitu :

1) Menyelaraskan dokumen tata ruang kabupaten dengan dokumen tata ruang Provinsi dan Nasional;

2) Melakukan review terhadap dokumen tata ruang;
3) Legitimasi terhadap produk hukum tata ruang daerah;
4) Melakukan upaya konservasi dan mengurangi luas lahan kritis;
5) Menjaga sumber-sumber air tetap lestari dengan melibatkan seluruh masyarakat;
6) Meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar wilayah hutan dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
7) Upaya konservasi pesisir dan laut, merehabilitasi ekosistem daratan, pesisir dan laut serta penyusunan tata ruang wilayah pesisir dan laut;
8) Melakukan simulasi secara berkala penanggulangan bencana dan dampak bencana dengan melibatkan masyarakat;
9) Penanggulangan bencana menjadi bagian dari sistem perencanaan Pembangunan Daerah; dan
10) Kerjasama lintas sektor, antara pusat dan daerah serta pelibatan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.

Melalui misi ini pemerintah daerah telah menetapkan beberapa strategi pokok yaitu :

1) Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan jembatan, dan kelayakan transportasi darat, laut dan udara;
2) Pembangunan dan optimalisasi seluruh jaringan irigasi teknis;
3) Pemberdayaan masyarakat petani pengguna air;
4) Penyediaan jalan mantap, pelabuhan laut dan udara yang memadai, serta kemudahan konektivitas antar wilayah

baik antar desa, kecamatan dan daerah pariwisata secara memadai;

5) Pemeliharaan dan pembangunan sanitasi dan air minum berbasis masyarakat serta pengembangan sistem jaringan distribusi air minum secara merata di masyarakat;
6) Penambahan dan optimalisasi energi listrik baik yang bersumber dari energi alternatif maupun jaringan PLN; dan
7) Penyediaan jaringan informasi dan telekomunikasi yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Melalui misi ini pemerintah daerah menetapkan beberapa strategi pokok
yaitu :

1) Pendidikan murah bagi semua pada semua jenjang pendidikan;
2) Kemudahan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
3) Pengembangan sistem menuju pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan;
4) Pelaksanaan PLS melalui Kejar Paket A,B, dan C;
5) Peningkatan kualitas proses belajar mengajar;
6) Penyediaan Guru yang berkualitas;
7) Pengelolaan Manajemen pendidikan yang berkualitas;
8) Pengembangan Sistem pendidikan non formal sesuai kearifan lokal;
9) Penyediaan tutor yang berkualitas;
10) Pembangunan dan Pengembangan Perpustakaan Daerah, Desa, dan Sekolah berbasis IT;

11) Pembangunan dan Optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan;
12) Pemberian ijin belajar dan tugas belajar bagi pendidik dan tenaga kependidikan:
13) Penerimaan tenaga pendidik berkualifikasi minimal S1;
14) Adanya Regulasi yang mengatur dan memastikan pelaksanaan Pengurus Utama Gender:
15) Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan Gender dalam segala bidang pembangunan;
16) Memberikan peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam menduduki jabatan penting sesuai kemampuan dan kompetensinya;
17) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berkomitmen dalam perlindungan anak;
18) Sinkronisasi dan pembentukan regulasi yang mengatur perlindungan anak;
19) Memberikan kesempatan kepada pemuda berperan aktif dalam pembangunan;
20) Pengembangan dan pembinaan olah raga prestasi sejak dini;
21) Pemberian *reward* kepada atlet dan mantan atlet berprestasi;

d. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan.

Melalui misi ini pemerintah daerah menetapkan beberapa stategi pokok yaitu :

1) Meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya;
2) Memperluas kesempatan kerja dan berusaha;
3) Pengembangan diversifikasi produk dan pengolahan pangan;

4) Pengembangan sektor unggulan sesuai potensi sumber daya yang tersedia;
5) Pembinaan dan pendampingan kepada petani dan nelayan;
6) Kemudahan akses permodalan untuk pengembangan usaha;
7) Pengembangan intensifikasi, ekstesifikasi, diversifikasi pertanian dan perikanan;
8) Pengembangan dan pemantapan pelaksanaan gerakan Lakamola Anansio;
9) Pengembangan dan Pengolahan hasil produk unggulan pertanian dan perikanan sesuai standar;
10) Promosi produk melalui media massa, eletronik dan pemeran-pameran produk pertanian;
11) Jaringan kerjasama kemitraan dalam pembinaan dan pemasaran produk;
12) Pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata pada obyek-obyek wisata potensial;
13) Penataan obyek-obyek wisata potensial secara berkelanjutan;
14) Kemudahan akses destinasi wisata;
15) Penyediaan pusat informasi pariwisata;
16) Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata;
17) Penyelenggaraan event-event wisata;
18) Penyediaan data dan informasi potensi sumberdaya pertanian dan perikanan;
19) Penciptaan iklim investasi yang kondusif;
20) Pelayanan perizinan yang mudah, murah, tepat dan cepat;
21) Kerjasama lintas sektor secara terpadu untuk pengembangan daerah agropolitan dan minapolitan;

22) Pengembangan usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan);
23) Meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi;
24) Pemberdayaan masyarakat secara terpadu dalam usaha yang berkelanjutan;
25) Membangun kemitraan usaha pemasaran dengan swasta dan daerah lain;
26) Pengembangan daerah pertumbuhan baru dengan penempatan penduduk potensial di lokasi translok.

e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Melalui misi ini pemerintah daerah menetapkan beberapa strategi pokok
yaitu :

1) Pembangunan sarana dan prasasarana kesehatan yang berkualitas;
2) Meningkatkan kapasitas tenaga medis dan paramedis;
3) Meningkatkan kapasitas institusi kesehatan;
4) Adanya peta informasi masyarakat kurang Gizi;
5) Meningkatkan pehamanan masyarakat sadar gizi;
6) Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh gizi;
7) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas;
8) Meninghkatkan kapasitas tenaga medis dan paramedis serta kebidanan;
9) Penyediaan dokter umum dan dokter ahli secara cukup;
10) Revolusi KIA;

11) Meningkatkan mutu pelayanan RSUD, puskesmas/puskesmas rawat inap dan pos pelayanan kesehatan lainnya sampai di wilayah kepulauan;
12) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan yang berkelanjutan;
13) Penyediaan fasilitas pelayanan KB yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah;
14) Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam ber-KB;
15) Kerjasama lintas sektor terkait pelayanan KB;
16) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin;
17) Penyediaan tenaga medis dan paramedis yang berkualitas melalui pemberian beasiswa, insentif dan peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedik;
18) Penanganan penyandang masalah sosial di masyarakat melalui pengembangan sistem kemitraan;
19) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
20) Pembangunan yang lebih terpadu, bersinergi, terintegrasi dan lintas sektor dalam penanganan kemiskinan sesuai lokus sasaran yang ditetapkan;
21) Optimalisasi potensi sumberdaya pertanian (tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan) serta sumberdaya laut dan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
22) Pemberdayaan tenaga kerja dengan pelatihan keterampilan berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja serta perluasan skala pelatihan keterampilan; dan

23) Meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban tenaga kerja;
24) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis; dan
25) Memperluas dan penyediaan lapangan kerja di perdesaan.

f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

Melalui misi ini pemerintah daerah menetapkan beberapa strategi pokok yaitu :

1) Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
2) Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
3) Transparansi dan akuntabilitas proses pembangunan;
4) Penerapan prinsip tata kelola sesuai sistem dan prosedur yang baik secara konsisten;
5) Penyiapan aparatur berkualitas sesuai komptensinya;
6) Penerapan Standar Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
7) Adanya standar pelayanan minimal dan SOP;
8) Penyelesaian kasus hukum berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat;
9) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM;
10) Meningkatkan partisipasi masyarakat;
11) Pengendalian produk hukum daerah;
12) Kemudahan masyarakat dalam mengakses produk hukum;
13) Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang produk hokum daerah;

14) Kejelasan pengukuran kinerja utama Perangkat Daerah;
15) Pengembangan sistem informasi pembangunan yang mudah di akses masyarakat;
16) Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan meningkatkan kerjasama koordinasi lintas sektor dalam rangka aksi anti korupsi;
17) Meningkatan ketersediaan SPM/SOP pada seluruh Prangkat Daerah;
18) Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMDA), e-Tata Naskah Dinas, *e-Government* dan *e-Proc* yang dapat diakses oleh masyarakat;
19) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga politik dalam berdemokrasi dan politik;
20) Menciptakan keamanan lingkungan masyarakat yang kondusif;
21) Meningkatkan kapasitas anggota Pol PP dan Linmas melalui pembekalan keterampilan dan penyegaran;
22) Meningkatkan pemahaman SPIP pada seluruh PNS;
23) Komitmen untuk menyelesaikan LHP tepat waktu;
24) Meningkatkan kapasitas;
25) Meningkatkan ketatalaksanaan dan optimalisasi kelembagaan pemerintah daerah;
26) Pengembangan sistem kearsipan pemerintah daerah yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
27) Meningkatkan kapasitas SDM pengarsipan;
28) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya;
29) Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

30) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah;

31) Penerapan SISDUR pengelolaan keuangan dan asset daerah.

4. KEBIJAKAN DAERAH

Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan *arah kebijakan* agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya.

a. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah ke dalam unit-unit Operasional Yang Tepat Dari Sisi Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan Negara.

Melalui misi ini pemerintah menetapkan beberapa *arah kebijakan* yaitu:

1) Menjaga rasio ketaatan terhadap rencana tata ruang dengan melaksanakan penegakan Perda Tata Ruang dan pemberian sanksi tegas pelanggaran terhadap Pemanfaatan Ruang;
2) Penetapan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pengembangn wilayah yang berkelanjutan sosialisasi dan publikasi dokumen tata ruang lewat website Rote Ndao, leaflet, booklet, papan informasi, dan media lain yang dapat diakses oleh masyarakat;
3) Mendorong kegiatan penghijauan dengan tanaman produktif pada areal konservasi, lahan kritis maupun tanah-tanah kosong di pekarangan sekitar rumah;
4) Penetapan kawasan terbuka hijau pada daerah-daerah sumber air;
5) Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumber-sumber air;

6) Pemberdayaan komunitas masyarakat sekitar hutan;
7) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui pengendalian kegiatan pembangunan yang mengacu pada kaidah tata ruang dan berbasis lingkungan;
8) Pembekalan keterampilan dan pengetahuan baik pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi/antisipatif terhadap bencana dan dampak bencana;
9) Menjaga situasi aman dan tenteram di seluruh wilayah baik di daerah perbatasan maupun di daerah lainnya.

b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.

Melalui misi pemerintah menetapkan beberapa arah kebijakan yaitu:

1) Peningkatan Jalan mantap status dan non status, serta mendorong peran aktif pihak swasta dalam penyediaan transportasi layak;
2) Meningkatkan Produksi dan produktivitas lahan beririgasi teknis;
3) Pelibatan masyarakat petani pengguna air dalam pengelolaan jaringan irigasi teknis;
4) Pengembangan sistem transportasi terpadu yang menjangkau pusat-pusat produksi di pedesaan dan daerah pariwisata;
5) Masyarakat mendapatkan akses air bersih layak dan sanitasi layak pada akhir tahun rencana;
6) Menjaga tersedianya energi listrik bagi seluruh masyarakat secara memadai melalui pengembangan energi alternatif terbarukan dan jaringan PLN;
7) Mendorong Pengembangan sistem jaringan informasi dan telekomunikasi yang dapat diakses masyarakat;

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Melalui misi ini pemerintah menetapkan beberapa arah kebijakan yaitu :

1) Pemberian beasiswa bagi gakin dan penggunaan dana BOS;
2) Pelayanan pendidikan sampai ke daerah terpencil;
3) Penduduk usia sekolah bersekolah pada semua jenjang pendidikan sesuai usianya;
4) Pendekatan pelayanan pendidikan sampai daerah terpencil
5) Pengembangan secara bertahap WAJAR pendidikan menengah sebagai WAJAR DIDKDAS 9 tahun;
6) Mendorong partisipasi masyakat;
7) Penduduk usia sekolah bersekolah pada semua jenjang pendidikan sesuai usianya;
8) Menurunkan angka buta huruf;
9) Menurunkan angka putus sekolah;
10) Meningkatkan rasio sekolah dengan siswa;
11) Kelulusan 100% pada semua jenjang pendidikan;
12) Peningkatan kompetensi guru;
13) Jumlah guru berijazah S1 meningkat;
14) Pendistribusian guru merata sesuai kebutuhan;
15) Penerapan kebijakan pendidikan yang berbasis sekolah;
16) Perluasan akses pendidikan non formal yang berkualitas melalui media keagamaan dan media lain yang layak;
17) Mendorong peran aktif masyarakat;
18) Peningkatan kapasitas tutor yang dibekali dengan pengetahuan keterampilan sesuai potensi;
19) Optimalisasi pelayanan perpustakaan berbasis IT yang mudah di akses oleh masyarakat;

20) Menjaga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
21) Mendorong seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 melalui kemudahan ijin belajar dan tugas belajar;
22) Optimalisasi pemberdayaan perempuan, pelibatan perempuan dalam segala bidang pembangunan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
23) Fasilitasi Pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan baik, pemerintah, lembaga keagamaan maupun NGO/swasta;
24) Penyusunan peraturan dan atau pelaksanaan peraturan yang melindungi anak dari segala tindak kekerasan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung perlindungan anak;
25) Mendorong peran serta pemuda dalam pembangunan di segala bidang;
26) Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pemuda;
27) Penguatan organisasi olah raga dalam membina olah raga di daerah;
28) Merangkul pihak swasta untuk memberikan dukungan pengembangan olahraga;
29) Penyelenggaraan lomba/kejuaraan olahraga;
30) Membina atlet berprestasi secara intensif;
31) Penguatan organisasi olahraga dalam membina olahraga di daerah.

d. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan.

Melalui misi ini pemerintah menetapkan beberapa arah kebijakan yaitu :

1) Perluasan jaringan usaha dan pemasaran;
2) Mendorong Penganekaragaman produksi pangan dan pengolahan pangan khas daerah yang memenuhi standar gizi;
3) Penetapan dan pelaksanaan pengembangan sektor unggulan;
4) Menjaga produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan tetap meningkat menuju surplus pangan terutama padi, jagung, hasil hutan dan perkebunan, ternak sapi, dan hasil perikanan;
5) Mendorong perluasan lahan pengembangan dan penganekaragaman hasil Lakamola Anansio;
6) Menjaga kontinuitas produksi dan kualitas produk unggulan daerah;
7) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha;
8) Mendorong adanya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai pada obyek wisata potensial secara bertahap;
9) Penataan kelembagaan;
10) Menjaga keaslian obyek-obyek wisata;
11) Kemudahan akses ke lokasi wisata baik transportasi maupun informasi pariwisata;
12) Penyiapan SDM pariwisata yang berkualitas;
13) Penyiapan seni dan budaya pendukung wisata;
14) Mendorong penciptaan kondisi yang kondusif iklim investasi melalui pemberian insentif kemudahan perizinan;

15) Menjaga fokus pengembangan daerah ekonomi baru sesuai potensi yang tersedia;
16) Menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku produk pertanian khas (lokal);
17) Penguatan lembaga koperasi dan peningkatan usaha koperasi;
18) Peningkatan kapasitas tenaga kerja koperasi untuk mendukung pengembangan usaha koperasi;
19) Pengembangan lembaga ekonomi mikro di perdesaan untuk mendukung pengembangan koperasi;
20) Fasilitasi dan optimalisasi kapasitas masyarakat terhadap akses permodalan;
21) Memperluas jaringan pemasaran produk baik antar pulau maupun untuk ekspor;
22) Pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan masyarakat transmigrasi lokal untuk mengembangkan daerah baru.

e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Melalui misi ini pemerintah menetapkan beberapa arah kebijakan yaitu :

1) Memperluas akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar sampai ke wilayah kepulauan dan penguatan kapasitas institusi kesehatan;
2) Penanganan fokus masyarakat kurang gizi sesuai peta gizi dengan melibatkan seluruh masyarakat;
3) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit Baa, Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap, dan Pustu sesuai standar kesehatan;

4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak beasiswa bagi putra daerah yang kuliah di kedokteran dan pemberian insentif yang cukup dalam rangka penyediaan tenaga dokter dan dokter ahli;
5) Mendorong terbentuknya BLUD;
6) Penanganan preventif secara terpadu dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan balita;
7) Mendorong penerapan standar pelayanan kesehatan (SIKDA), Efisiensi dan efektivitas manajemen kesehatan, dan pelayanan kesehatan yang komprehensif yang mengutamakan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif;
8) Menjaga angka pertumbuhan penduduk dibawah 1,97%;
9) Meminimalkan hambatan bagi penduduk miskin dan rentan terhadap akses pelayanan kesehatan berkualitas;
10) Fasilitasi ketersediaan tenaga medis dan paramedis yang berkualitas secara memadai;
11) Mendorong pendirian panti sosial dan meningkatkan pelayanan masyarakat penyandang masalah sosial;
12) Penyempurnaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di semua SKPD yang difokuskan pada lokasi sasaran sesuai peta kemiskinan;
13) Menjaga peningkatan pertumbuhan produksi serta memfasilitasi ketahanan pangan masyarakat;
14) Memperluas jejaring informasi pasar kerja dengan daerah dan negara lain;
15) Pengembangan kewirausahaan dalam rangka mencipatkan tenaga kerja yang mandiri;

16) Pengembangan pengawasan ketenagekerjaan, Pencegahan TKI ilegal dan menurunnya kasus-kasus ketenagakerjaan;
17) Pengembangan agropolitan dan minapolitan yang memanfaatkan potensi lokal yang dapat meyerap tenaga kerja.

f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

Melalui misi ini pemerintah menetapkan beberapa arah kebijakan yaitu:

1) Peningkatan Pelayanan publik yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel;
2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
3) Pengembangan pengawasan internal dan eksternal secara intensif;
4) Memfasilitasi adanya SPM/SOP masing-masing SKPD yang dapat dipantau masyarakat;
5) Koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum, TOA, Toga dan Tomas;
6) Memfasilitasi peningkatan kesadaran hukum dan HAM masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, media cetak, dan media lainnya;
7) Sosialisasi produk hukum daerah dan mendorong jaminan kepastian hukum daerah;
8) Pemberdayaan masyarakat akan hukum dan produk hukum daerah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pembangunan;
9) Memastikan kinerja pemerintah terukur sesuai target yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan;

10) Pemberdayaan masyarakat akan pentingnya IT dan mendorong masyarakat untuk merasa memiliki pembangunan;
11) Penguatan aksi anti korupsi serta menjaga pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
12) Mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien sesuai standar mutu pelayanan prima yang berbasis IT;
13) Meningkatkan kualitas demokrasi dan politik masyarakat untuk menjaga situasi kondusif;
14) Mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang;
15) Menjaga kesiap-siagaan anggota Pol PP dan Linmas dalam berbagai kondisi sosial masyarakat;
16) Mendorong penerapan SPIP dalam pelaksanaan tugas PNS menuju opini WTP;
17) Meningkatkan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah;
18) Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang profesional dan handal yang didukung sistem kerasipan yang komprehensif;
19) Optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah;
20) Pengelolaan keuangan dan aset menuju basis akrual;
21) Optimalisasi pengelolaan keuangan dan asset daerah menuju opini WTP.

B. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekat dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Kinerja

Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao ini merupakan alat ukur yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target–target yang telah ditetapkan.

Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pemerintah pada akhir tahun 2019 karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Selain Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 19 September 2015 menjadi acuan dalam penyusunan LKIP, RKT dan PK tahun 2019.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 mengacu pada APBD Tahun 2019, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2019 dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 adalah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN		INDIKATOR		TARGET
1		2		3
MISI I :	**MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH KE DALAM UNIT-UNIT OPERASIONAL YANG TEPAT DARI SISI EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN KEAMANAN NEGARA**			
1.	Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Sesuai Kaidah Tata Ruang	1.1	Presentase Perda RTRW	100%
2.	Meningkatnya Daya Dukung Lahan	2.1	Jumlah Sampah Yang Terangkut	14.250 M^3
		2.2	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang Dihasilkan (LKPLHD) dan Laporan Pengelolaan Sampah	2 Dokumen
		2.3	Jumlah Mata Air Yang Dipantau dan Diuji Kualitasnya	6 Mata Air
		2.4	Panjang Konstruksi Turap Yang Dibangun	250 Meter

3.	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Pemukiman Layak Huni dan Produktif	3.1	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Dibangun	350 Unit

No	Program		Anggaran
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.	3.402.258.800
2.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.	362.000.000
3.	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	9.221.426.000
4.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp.	75.000.000
	JUMLAH	**Rp.**	**13.060.684.800**

MISI II :	**MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SERTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**			
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi Publik Yang Memadai Secara Kualitas dan Kuantitas	1.1	Panjang Jalan Terbangun	68,130 KM
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jaringan Irigasi Teknis	2.1	Panjang Irigasi Yang Direhabilitasi	2.000 Meter
		2.2	Jumlah Embung Yang Direhabilitasi	6 Unit

3.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih dan Sanitasi Layak	3.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Yang Dibangun	1.330 SR

No	Program		Anggaran
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.	80.452.558.050
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp.	2.333.000.000
2	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp.	5.120.858.000
3.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp.	4.644.405.000
	JUMLAH	**Rp.**	**92.550.821.050**

MISI III :	**MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING**			
1.	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	1.1	Presentase APM : a. SD	84,32%
			b. SMP	60,79%
		1.2	Presentase APK : a. SD	99,59%
			b. SMP	98,01%
2.	Meningkatnya Mutu dan Prosentase Kelulusan	2.1	Presentase Kelulusan a. SD/MI	100%
			b. SMP/MTs/SMPLB	100%
3.	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Non Formal	3.1	Presentase Angka Melek Huruf	95,21%

4.	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Perpustakaan	4.1	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	200 Buku
5.	Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan	5.1	Jumlah Ruangan Kelas SD/SMP Yang Dibangun	18 Ruangan
6.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	6.1	Lembaga PUG Yang Aktif	15 Lembaga
7.	Meningkatnya Perlindungan Anak	7.1	Lembaga Perlindungan Anak Yang Aktif	2 Lembaga
8.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Dalam Segala Bidang baik Lokal, Regional Maupun Nasional	8.1	Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Aktif Terbina	12 Organisasi
		8.2	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi	150 Orang

No	Program		Anggaran
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Rp.	55.693.792.426
2.	Program Pendidikan Non Formal	Rp.	124.104.000

3.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Rp.	369.762.636
4.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Rp.	34.999.800
5.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Rp.	293.124.600
6.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Rp.	515.000.000
	JUMLAH		**Rp.**	**57.030.783.462**
MISI IV :	**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DI DUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN**			
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1.1	• Jumlah Produksi Gabah	107.892,90 Ton
			• Jumlah Produksi Jagung	14.124,80 Ton
			• Jumlah Produksi Bawang Merah	4.816 Ton
			• Jumlah Produksi Sorgum	17,80 Ton
			• Jumlah Produksi Kacang Tanah	916,00 Ton
			• Jumlah Gula Air	150,00 Ton
			• Jumlah Produksi Kelapa	3.374 Ton
			• Jumlah Jambu Mete	75,00 Ton
			• Jumlah Produksi Tangkap	3.361 Ton

			• Jumlah Produksi RTP Tangkap	2.890 Ton
			• Jumlah Produksi Budidaya	15.777 Ton
			• Jumlah RTP Budidaya	10.453 KK
			• Jumlah Pemanfaatan Budidaya	2.214 Ha
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata	2.1	Jumlah Akomodasi Pariwisata :	
			• Hotel/Losmen	12 Unit
			• Kamar	150 Buah
			• Tempat Tidur	287 Buah
3.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	3.1	Jumlah Kunjungan Wisata :	
			• Wisatawan Mancanegara	2.581 Orang
			• Wisatawan Nusantara	700 Orang
			• Rata-rata Lama Menginap	7 Hari
4.	Meningkatnya Jumlah Industri Berbasis Pertanian	4.1	Jumlah UMKM	182 Unit

5.	Meningkatnya Jumlah dan Mutu Koperasi Yang Sehat	4.1	Jumlah Koperasi Yang Aktif: • Jumlah Koperasi • Jumlah Anggota • Jumlah Modal Sendiri	 217 Unit 12.697 Orang Rp. 25.000.000.000

No	Program		Anggaran
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp.	5.195.306.449
2.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp.	310.000.000
3.	Program Peninkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rp.	226.960.500
4.	Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp.	774.015.450
5.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.	1.427.300.000
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp.	855.000.000
7.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menegah	Rp.	295.000.000
8.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	200.000.000
	JUMLAH	**Rp.**	**9.283.582.399**

MISI V :	**MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**			
1.	Menurunnya Gizi Buruk	1.1	Presentase Balita Kurang Gizi	5,6 %
		1.2	Presentase Balita Gizi Buruk	0,5 %

2.	Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit	2.1	Pengendalian penyakit:	
			• Muntaber (Diare)	2.645 Kasus
			• Demam Berdarah	0%
			• Jumlah Angka Kesakita Malaria 4/1.000 Penduduk menjadi 0,75/1.000 Penduduk	0,75/1.000
			• TBC	109/100.000
			• Kusta	0,14/10.000
3.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB	3.1	Akseptor KB	2.821 AB
			• Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	19.644 PUS
			• Prosentase KB Aktif	70,71%
4.	Meningkatnya Jumlah dan Mutu Tenaga Medis dan Paramedis	4.1	Jumlah Dokter	35 Orang
			Jumlah Bidan/Perawat	217 Orang
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan	5.1	Presentase Penurunan Penduduk Miskin	54,49 %
6.	Menurunnya Angka Pengangguran	6.1	Presentase Penurunan Jumlah Pengangguran	2,83 %

No	Program	Anggaran	
1.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp.	341.612.068
2.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	3.984.390.229
3.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	29.351.885.973
4.	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Rp.	1.492.355.613
5.	Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita	Rp.	42.745.500
6.	Program Pemberantasan TB	Rp.	1.600.000
7.	Program Keluarga Berencana	Rp.	3.702.839.343
8.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp.	25.000.000
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Evaluasi (KIE)/Advokasi KB	Rp.	705.780.000
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses Pelayanan KB yang berkualitas	Rp.	939.180.000
11.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya	Rp.	230.000.000
12.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Rp.	600.000.000
13.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp.	245.000.000
14.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.	50.000.000
15.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	274.494.000
	JUMLAH	**Rp.**	**41.986.882.726**

MISI VI :	**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**			
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur sesuai Prinsip-prinsip *Good Governance*	1.1	Prosentase Pelayanan Perijinan Satu Pintu	100%
2.	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	2.1	Jumlah Sosialisasi Sadar Hukum	1 Sosialisasi
3.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Pembangunan	3.1	Jumlah Pengunjung Website Rote Ndao	1.000 Orang
4.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	4.1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**Rp. 28.779.975.967,25**
5.	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	5.1	Opini BPK terhadap Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini WDP

No	Program		Anggaran
1.	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp.	150.000.000
2.	Program Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	134.000.000
3.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rp.	347.650.000

4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	1.679.497.358
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	380.000.000
6.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	3.039.450.000
7.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	336.290.000
	JUMLAH	**Rp.**	**6.066.887.358**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2019 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima merupakan penjabaran dari Kinerja Instansi Pemerintah (KIP). Pertanggungjawaban disampaikan secara periodik, yaitu melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Untuk mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Perangkat Daerah melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sararan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi serta membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis adalah dengan ***Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rote Nado Nomor 49Tahun 2015***. Sedangkan ***Acuan untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah RPJMD (2014-2019), RKT 2019 dan Penetapan Kinerja 2019.***

Metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran capaian kinerja:

PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran dibuat untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya. Dengan demikian keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dan terukur dengan jelas.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran sebagai berikut :

X ≥ 85 %	Sangat Berhasil
70 % ≤ X <85 %	Berhasil
55 % < X < 70 %	Cukup Berhasil
X ≤ 55 %	Belum Berhasil

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 dapat jelaskan sebagai berikut :

MISI I	**:**	**MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH KE DALAM UNIT-UNIT OPERASIONAL YANG TEPAT DARI SISI EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN KEAMANAN NEGARA**

SASARAN 1	**Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sesuai Kaidah Tata Ruang**

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan wilayah nasional/daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan penataan ruang Pemerintah Kabupaten Rote Ndao wajib melaksanakan:

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis kabupaten;
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten;
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
d. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan ijin pengelolaan lahan maupun hutan. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan
Ruang Sesuai Kaedah Tata Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real		
1	Presentase Perda RTRW	%	0	100	100	100	100
Rata – rata						**100**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Presentase Perda RTRW pada tahun 2019 sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga Capaian Kinerja Sasaran ***"Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Sesuai Kaidah Tata Ruang"*** adalah **100%** atau dikategorikan ***Sangat Berhasil.***

Capaian kinerja Presentase Perda RTRW pada tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%. RTRW Kabupaten Rote Ndao masih merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao, pada tahun anggaran 2019 telah dilakukan revisi RTRW namun belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Capaian kinerja Presentase Perda RTRW pada tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, maka menunjukan bahwa mencapai kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%. RTRW Kabupaten Rote Ndao masih merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao, namun telah dilakukan peninjauan kembali pada tahun anggaran 2018.

Capaian kinerja Presentase Perda RTRW pada tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 maka menunjukan bahwa telah mencapai target yaitu sebesar 100%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KHLS) RTRW dengan dukungan dana sebesar Rp. 985.000.000 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 610.802.509 (*Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*) atau sebesar 62,01%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 62,01% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%, maka menunjukan bahwa terjadi efesiensi penggunaaan sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi melalui pertemuan dan rapat-rapat koordinasi;
2. Masih terbatasnya SDM di bidang penataan ruang belum memadai,
3. Masih rendahnya pehamanan masyarakat tentang penataan ruang; dan
4. Masih rendahnya partisipasi masrayarakat dalam mendukung pelaksanaan penataan RTRW Kabupaten Rote Ndao.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah-langkah yaitu :

1. Peningkataan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi melalui pertemuan dan rapat-rapat koordinasi;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang penataan ruang; dan
3. Peningkatan sosialisasi guna meningkatkan pehamanan dan partisipasi masyarakat tentang penataan ruang.

SASARAN 2	Meningkatnya Daya Dukung Lahan

Sasaran ini diarahkan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Daya Dukung Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target akhir RPJMD 2019
				Target	Real		
1	Jumlah Sampah Yang Terangkut	M^3	14.154	14.250	12.630	88,63	4,5
2	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Yang Dihasilkan (LKPLHD) Dan Laporan Pengelolaan Sampah	Dok	2	2	2	100	0,1
3	Jumlah Mata Air Yang Dipantau Dan Diuji Kualitasnya	Mata air	3	6	6	100	10

4	Panjang Konstruksi Turap Yang Dibangun	Meter	250	250	250	100	1.950
	Rata – rata					**97,16**	

Dari tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Lahan pada tahun 2019 sebesar 97,16%, sehingga capaian kinerja sasaran "***Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Lahan***" adalah **97,16%** atau dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran dimaksud sebagai berikut:

1) Jumlah Sampah Yang Terangkut.

   Pelayanan persampahan adalah upaya dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui dinas teknis untuk mengangkut sampah pada tempat pembuangan sampah yang telah disiapkan, dari jumlah sampah yang ditargetkan sebanyak 14.250 M^3 sampah terealisasi sebanyak 12.630 M^3 atau 88,63% sampah yang terangkut pada tahun 2019. Jumlah sampah terangkut tahun 2019 sebanyak 12.630 M^3 terangkut atau tertangani dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) Maubesi di Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah. Wilayah pelayanan penanganan sampah tersebut meliputi wilayah Kota Ba'a, yaitu : Kelurahan Mokdale, Kelurahan Namodale, Kelurahan Metina, Desa Sanggaoen, Desa Holoama dan Desa Baadale. Pencapaian kinerja ini masih sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah untuk membuang sampah pada TPS yang telah ditentukan sehingga jumlah sampah yang terangkut tidak memenuhi target.

   Capaian kinerja indikator Jumlah Sampah Terangkut pada tahun

2019 Sebanyak 12.630 M³ jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 Sebanyak 14.250 M³ maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 88,63%.

Capaian kinerja Jumlah Sampah Terangkut tahun 2019 Sebanyak 12.630 M³jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 Sebanyak 14.154M³ maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebanyak 1524 M³ atau sebesar 12,07%.

Capaian kinerja Jumlah sampah yang terangkut tahun 2019 sebanyak 12.630 M³ jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 Sebanyak 4,5 M³ maka menunjukan bahwa melampaui target peningkatan sampah yang terangkut secara signifikan sebanyak 12.626 M³.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan melalui Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan dukungan dana sebesar Rp. 362.000.000 (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*) terealisasi Rp. 265.550.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 73,36%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 73.36% jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 88,63%, maka menunjukan bahwa terjadi efesiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja.

2) Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup.

Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dihasilkan (LKPLHD) dan Laporan Pengelolaan Sampah pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) dokumen.

Capaian kinerja Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dihasilkan (LKPLHD) dan Laporan Pengelolaan Sampah tahun 2019 sebanyak 2 (dua) dokumen jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 2 (dua) dokumen, maka menunjukan bahwa telah mencapai

target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Yang Dihasilkan (LKPLHD) dan Laporan Pengelolaan Sampah pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) dokumen jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 2 (dua) dokumen maka menunjukan bahwa mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dihasilkan (LKPLHD) dan Laporan Pengelolaan Sampahpada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) dokumen jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 0,1 dokumen maka telah melampaui target yang sangat signifikan dengan pencapaian kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan dengan dukungan dana sebesar Rp. 75.000.000 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 21.923.000 (*Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*) atau sebesar 29,23%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 29,23% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, maka menunjukan bahwa terjadi efesiensi sumber daya yang sangat signifikan dalam mencapai kinerja tersebut.

3) Jumlah Mata Air Yang Dipantau dan Diuji Kualitasnya.

Jumlah Mata Air Yang Dipantau Dan Diuji Kualitasnya ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 6 (enam) mata air/titik terealisasi 6 (enam) mata air/titik yaitu mata air Tilonisi, mata air Oemau, mata air Tanggaloi, mata air Siukoen, DAS Menggelama, dan Pelabuhan Laut Ba'a.

Capaian kinerja Jumlah Mata Air Yang Dipantau dan Diuji Kualitasnya tahun 2019 sebanyak 6 (enam) mata air jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 6 (enam) mata air maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Mata Air Yang Dipantau dan Diuji Kualitasnya tahun 2019 sebanyak 6 (enam) mata air jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) mata air maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Mata Air Yang Dipantau dan Diuji Kualitasnya pada tahun 2019 sebanyak 6 (enam) mata air jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 10 (sepuluh) mata air maka belum mencapai target yang diharapkan dengan pencapaian kinerja sebanyak 6 (enam) mata air atau 40%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan dukungan dana sebesar Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 29.574.600 (*Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*) atau sebesar 59,15%.

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 59,15% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya yang signifikan dalam pencapaian kinerja.

4) Panjang Konstruksi Turap Yang Dibangun.

Panjang Konstruksi Turap yang Dibangun pada tahun 2019 sepanjang 250 meter. Pembangunan Konstruksi Turap tersebut berlokasi pada Daerah Alirah Sungai (DAS) Kampung Ninik di Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain.

Capaian kinerja Panjang Konstruksi Turap Yang Dibangun pada tahun 2019 sepanjang 250 meter jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sepanjang 250 meter maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Panjang Konstruksi Turap yang Dibangun tahun 2019 sepanjang 250 meter jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sepanjang 250 meter maka menunjukan bahwa mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Panjang Konstruksi Turap yang Dibangun pada tahun 2019 sepanjang 250 meter, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sepanjang 1.950 meter maka belum mencapai target yang diharapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 12,82%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup dengan dukungan dana sebesar Rp. 2.367.258.800 (*Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 1.237.871.908, (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah*) atau sebesar 52,29%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 52,29% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya yang signifikan dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapai dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya;
3. Masih terbatasnya SDM di bidang pengolahan lingkungan hidup dan AMDAL belum memadai; dan
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim pada laboratorium lingkungan hidup.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah-langkah yaitu :

1. Peningkataan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi melalui pertemuan dan rapat-rapat koordinasi;
2. Melakukan sosialisasi dan pengawasan dalam meningkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan AMDAL; dan
4. Pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan AMDAL.

SASARAN 3	**Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Pemukiman Layak Huni dan Produktif**

Sasaran ini diarahkan pada Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dasar perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Cakupan rumah tangga yang terlayani Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) pada tahun 2019 sebanyak 508 unit melalui fasilitasi dan stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan konsep ALADIN (Atap Lantai dan Dinding).

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Pemukiman Layak Huni dan Produktif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real		
1	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Dibangun	Unit	118	350	508	158	-
Rata – rata						**158**	

Dari tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun pada tahun 2019 sebanyak 508 unit dengan capaian kinerja sebesar 158%, sehingga capaian kinerja sasaran "***Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Pemukiman Layak Huni dan Produktif***" adalah **158%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Capaian kinerja Jumlah Rumah Layak Huni yang Dibangun pada tahun 2019 sebanyak 525 unit jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 350 unit maka menunjukan bahwa melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 158%.

Capaian kinerja Jumlah Rumah Layak Huni yang Dibangun tahun 2019 sebanyak 525 unit jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 118 unit maka menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja sebesar 330,51%.

Capaian kinerja Rumah Layak Huni yang Dibangun tahun 2019 sebanyak 525 unit belum ditargetkan pada tahun akhir RPJMD 2019 karena merupakan sebuah program terobosan baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 sebagai salah satu upaya untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup yang layak, sehingga capaian indikator ini tidak dilakukan perbandingan dengan target capaian tahun akhir RPJMD 2014-2019.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan Perumahan melalui Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan dukungan dana sebesar Rp. 9.221.426.000 (*Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 8.821.861.800 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Pulu Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*) 95,67%. Realisasi anggaran sebesar 95,67% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 150%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya yang signifikan dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapai dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Belum tersedianya data base yang terpadu Rumah Tangga yang belum memiliki rumah layak huni; dan
3. Faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan swadaya masyarakat dalam membangun rumah layak huni.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah-langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi melalui pertemuan dan rapat-rapat koordinasi;
2. Pembentukan data base Rumah Tangga yang belum memiliki Rumah Layak Huni; dan
3. Peningkatan alokasi anggaran stimulan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.

MISI II	:	**MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SERTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

SASARAN 1	**Tersedianya Sarana Dan Prasarana Transportasi Publik Yang Memadai Secara Kualitas Dan Kuantitas**

Strategi yang dilakukan untuk sarana dan prasarana transportasi publik yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas di Kabupaten Rote Ndao. Pembangunan jalan dan jembatan merupakan modal transportasi utama yang berperan penting dalam pendukung pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi Publik Yang Memadai Secara Kualitas dan Kuantitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target AkhirR PJMD 2019
				Target	Realisasi		
1.	Panjang Jalan Terbangun	Km	32,000	68,130	67,978	99,78	5,000
Rata – rata						**98,78**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Panjang Jalan yang Terbangun pada tahun 2019 sepanjang 67,978 Km dengan capaian kinerja sebesar 99,78%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Tersedianya Sarana Dan Prasarana Transportasi Publik Yang Memadai Secara Kualitas dan Kuantitas"*** adalah **99,78%** atau dikategorikan ***Sangat Berhasil.***

Capaian kinerja Panjang Jalan Yang Terbangun pada tahun 2019 sepanjang 67,978 Km jika dibandingkan dengan target kinerja tahun

2019 sepanjang 68,130 Km maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 99,78%..

Capaian kinerja Panjang Jalan Yang Terbangun tahun 2019 sepanjang 67,978 Km jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sepanjang 32,000 Km maka menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja yang signifikan sepanjang 99,978 Km atau sebesar 212,43%.

Capaian kinerja Panjang Jalan Yang Terbangun tahun 2019 sepanjang 67,978 Km jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sepanjang 5,000 Km maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sepanjang 62,978 Km

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan melalui Kegiatan Pembangunan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.80.452.558.050,- *(Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah)* terealisasi sebesar Rp.78.948.181.453,- *(Tujuh Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)* atau 98,13%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 98,13% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 99,78%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapai dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Banyaknya kerusakan jalan akibat meningkatnya muatan dan dimensi berlebih serta rendahnya alokasi dana pemeliharaan;
2. Banyaknya kerusakan jalan akibat bencana alam, menyebabkan alokasi anggaran yang semula untuk pemeliharaan jalan berubah untuk darurat; dan
3. Masih terbatasnya kemampuan pemerintah membiayai pembangunan jalan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan yang ada.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah-langkah yaitu :

1. Mempertahankan kondisi pelayanan jaringan jalan dengan melakukan pemeliharaan rutin maupun berkala; dan
2. Penanganan jaringan jalan di daerah rawan bencana alam yaitu pada daerah rawan tanah longsor dan banjir.

SASARAN 2	**Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jaringan Irigasi Teknis.**

Ketersediaan air untuk pertanian dan untuk sumber air bersih masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana untuk irigasi dan air bersih. Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi teknis dalam rangka penyediaan air baku guna mendukung pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jaringan Irigasi Teknis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real		
1.	Panjang Irigasi Yang Direhabilitasi	Meter	2.187,65	2.000	2.943	147,15	883
2	Jumlah Embung Yang Direhabilitasi	Unit	9	6	6	100	125
	Rata – rata					**123,58**	

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jaringan Irigasi Teknis pada tahun 2019 sebesar 123,58%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jaringan Irigasi Teknis"*** adalah **123,58%** atau di kategorikan **Sangat Berhasil.**

Analisis pencapaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut :

1. Panjang Saluran Irigasi Yang Direhabilitasi

   Pencapaian kinerja jaringan irigasi ini maka berdampak positif pada luas areal tanam pertanian dengan penambahan baku lahan serta produktifitas lahan sehingga dapat mengatasi masalah kekurangan air ke area persawahan. Adapun lokasi jaringan Irigasi yang di rehabilitasi pada tahun anggaran 2019 yaitu :

   1) Jaringan Irigasi di Olafulihaa (Saluran Irigasi Lanamok Timur, Kelurahan Olafulihaa); dan
   2) Jaringan Irigasi di Dodaek (Saluran Irigasi Ingulenga, Desa Tebole).

   Capaian kinerja Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi pada tahun 2019 sepanjang 2.943 meter jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sepanjang 2.000 meter maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 147,15%.

   Capaian kinerja Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi pada tahun 2019 sepanjang 2.943 meter jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sepanjang 2.187,65 meter maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sepanjang 756 meter atau sebesar 134,53%.

   Capaian kinerja capaian kinerja Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi pada tahun 2019 sepanjang 2.943 meter jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sepanjang 883 metermaka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sepanjang 2.060 meter atau sebesar 233%.

   Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku melalui Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa dengan dukungan dana sebesar Rp. 2.333.000.000 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 2.234.960.000 (*Dua*

Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau 95,80%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 95,80% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 147,15%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya yang signifikan dalam pencapaian kinerja.

2. Jumlah Embung Yang Direhabilitasi.

   Jumlah Embung yang Direhabilitasi pada tahun 2019 sebanyak 6 (enam) embung. Terpeliharanya bangunan pengelolaan konservasi dan sumber daya air lainnya berupa embung yang berfungsi sebagai cadangan atau persediaan air di musim kemarau. Sasaran rehabilitasi ini pada lahan kering dan lahan tadahan air hujan pada hulu DAS (Keterpadatan air tanah sangat dalam type iklim C-D-E dan struktur tanah *non permeable*). Adapun 6 (enam) embung yang direhabilitasi tersebut antara lain :

   1) Rehabilitasi Berat bendung Temas Dusun Faianak Desa Temas Kecamatan Rote Barat Laut;
   2) Rehabilitasi Embung PaoboakDesa Lekona Kecamatan Pantai Baru;
   3) Rehabilitasi Embung Modo'oen Desa Meoain Kecamatan Rote Barat Daya;
   4) Rehabilitasi Embung Oehe Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya;
   5) Rehabilitasi Bendung Olakayo (Bendung Olakayo, Desa Suebela) Kecamatan Rote Tengah; dan
   6) Rehabilitasi Bendung Tuanatuk (Bendung Soloe, Desa Tuanatuk) Kecamatan Lobalain.

   Capaian kinerja Jumlah Embung Yang Direhabilitasi pada tahun 2019 sebanyak 6 (enam) embung jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 6 (enam) embung maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Embung Yang Direhabilitasi pada tahun 2019 sebanyak 6 (enam) embung jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 9 (sembilan) embung maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebesar 33,33%.

Capaian kinerja Jumlah Embung Yang Direhabilitasi pada tahun 2019 sebanyak 6 (enam) embung jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak sebanyak 125 embung maka menunjukan bahwa belum mencapai target yang diharapkan dengan pencapaian kinerja sebanyak 6 (enam) embung atau sebesar 4,80%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya melalui Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan dukungan dana sebesar Rp.5.120.858.000 (*Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)* terealisasi sebesar Rp.4.899.873.350 *(Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)* atau 95,68%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 95,68% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapai dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Kondisi curah hujan yang rendah sehingga debit penampungan air tertampung sangat rendah sehingga merusak struktur bangunan embung; dan
2. Masih terbatasnya kemampuan pemerintah membiayai optimalisasi/rehabilitasi embung/irigasi dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan yang ada.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah-langkah yaitu :

1. Melakukan optimalisasi/rehabilitasi peningkatan/pengembangan daerah irigasi yang potensial. Untuk pengembangan/peningkatan dan rehabilitasi khusus daerah irigasi diusulkan ke Pusat, sedangkan untuk penanganan operasi dan pemeliharaan disesuaikan dengan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten; dan
2. Melakukan penyediaan air baku untuk penduduk, lahan kering, lahan basah, perkebunan, padang pengembalaan.

SASARAN 3	**Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kebutuhan air bersih dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Sasaran ini diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana cakupan pelayanan air bersih dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada tahun anggaran 2019 melakukan pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.038 Sambungan Rumah (SR), dengan rincian sebagai berikut:

1. Mata Air Tilonisi = 270 SR
2. Mata Air Oemuti = 89 SR
3. Mata Air Silukoen = 139 SR
4. Mata Air Oemau = 210 SR
5. Mata Air Lualemba = 180 SR
6. Desa Sanggaoen dan Desa Oelunggu = 150 SR

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih dan Sanitasi Layak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real		
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Yang Dibangun	SR	335	1.330	1.038	78,05	4.404
Rata – rata						**78,05**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Prosentase Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih yang Dibangun pada tahun 2019 sebanyak 1.038 SR dengan capaian kinerja sebesar 78,05%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih dan Sanitasi Layak "*** adalah **78.05%** atau dikategorikan ***Berhasil.***

Capaian kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih yang Dibangun pada tahun 2019 sebanyak 1.038 SR jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 1.330 SR maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 78,05%.

Capaian kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih yang Dibangun pada tahun 2019 sebanyak 1.038 SR jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 335 SR maka menunjukan bahwa mengalami peningkatan kinerja sebesar 33,33%.

Capaian kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih yang Dibangun pada tahun 2019 sebanyak 1.038 SR jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 4.404 SR maka menunjukan bahwa belum mencapai dengan pencapaian kinerja sebesar 23,47%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat didukung

dengan dana sebesar Rp.4.644.405,000 *(Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah)* terealisasi sebesar Rp. 4.436.046.823 *(Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)* atau sebesar 95,51%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 95,51% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 78,05%, maka menunjukan bahwa belum terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapai dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Masih terbatasnya kemampuan pemerintah membiayai pengembangan layanan jaringan distribusi air minum bagi masyarakat; dan
2. Masih kurangnya dukungan SDM di bidang pengembangan layanan jaringan distribusi air minum.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah-langkah yaitu :

1. Melakukan identifikasi dan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber air potensial sebagai prioritas pengembangan guna peningkatan layanan jaringan distribusi air minum bagi masyarakat; dan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang pengembangan layanan jaringan distribusi air minum.

MISI III :	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

SASARAN 1	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sasaran ini diarahkan untuk masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan sehingga dapat menurunkan angka buta huruf, meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) baik di tingkat SD/MI, dan SMP/MTs.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Realisasi		
1	Prosentase APM						
	a. SD	%	84,32	84,32	84,27	99,94	100
	b. SMP	%	60,79	60,79	62,76	103,24	100
2	Prosentase APK						
	a. SD	%	99,59	99,59	98,60	99,01	100
	b. SMP	%	98,01	98,01	95,65	97,59	100
	Rata-rata					**99,95**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwarata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat pada tahun 2019 sebesar 99,95%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat"*** adalah **99,95%** atau dikategorikan ***Sangat Berhasil.***

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Indikator Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM)

   Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berkaitan dengan

Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan 2 indikator yaitu:

a. Prosentase APM Sekolah Dasar (SD).

Indikator ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui berapa besar prosentase penduduk yang berusia sekolah (7-12 tahun) yang telah bersekolah pada tingkat SD/MI.

Prosentase Penduduk Kabupaten Rote Ndao yang berusia sekolah (7-12 tahun) yang telah bersekolah pada tingkat SD/MI di tahun 2019 sebanyak 16,971 orang dari jumlah penduduk rata-rata usia 7-12 tahun 21.140 orang, maka Prosentase APM SD tahun 2019 sebesar 84,27%.

Capaian kinerja Prosentase APM SD pada tahun 2019 sebesar 84,27% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 84,32% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 99,94%.

Capaian kinerja Prosentase APM SD pada tahun 2019 sebesar 84,27% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 84,32% maka menunjukan bahwa terjadi penurunan kinerja sebesar 0.06%.

Capaian kinerja Prosentase APM SD pada tahun 2019 sebesar 84,27% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 84,27%.

b. Prosentase APM Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Indikator ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui berapa besar prosentase penduduk yang berusia sekolah (13-15 tahun) yang telah bersekolah pada tingkat SMP/MTs.

Prosentase Penduduk yang berusia sekolah (13-15 tahun) yang telah bersekolah pada tingkat SD/MI di Tahun 2019 sebanyak 6.413 orang, dari jumlah penduduk rata-rata usia 13-15 tahun

10.219 orang maka capaian indikator Prosentase APM SMP sebesar 62,76%.

Capaian kinerja Prosentase APM SMP pada tahun 2019 sebesar 62,76% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 60,79% maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 103,24%.

Capaian kinerja Prosentase APM SMP pada tahun 2019 sebesar 62,76% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 60,79% maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 103,24%.

Capaian kinerja Prosentase APM SMP pada tahun 2019 sebesar 62,76% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 62,76%.

2. Indikator Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partispasi Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan prosentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berkaitan dengan Prosentase Angka Partisipasi Kasar Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan 2 (dua) indikator yaitu:

a. Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK)Sekolah Dasar (SD).

Indikator ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui berapa besar prosentase penduduk yang berusia sekolah SD/MI yang telah bersekolah pada tingkat SD/MI.

Prosentase Penduduk yang berusia sekolah (7-12 tahun) yang telah bersekolah pada tingkat SD/MI di Tahun 2019 sebanyak 19.859 orang, dari jumlah penduduk rata-rata usia 7-12 tahun 20.140

orang maka capaian Prosentase APK SD adalah 98,60%.

Capaian kinerja Prosentase APK SD pada tahun 2019 sebesar 98,60% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 99,59% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 99,01%.

Capaian kinerja Prosentase APK SD pada tahun 2019 sebesar 98,60% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 99,59% maka menunjukan bahwa terjadi penurunan kinerja sebesar 0.99%.

Capaian kinerja Prosentase APK SD pada tahun 2019 sebesar 98,60% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 98,60%.

b. Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Indikator ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui berapa besar prosentase penduduk yang berusia sekolah SMP yang telah bersekolah pada tingkat SMP.

Prosentase Penduduk yang berusia sekolah (7-12 tahun) yang telah bersekolah pada tingkat SD/MI di Tahun 2019 sebanyak 9.774 orang, dari jumlah penduduk rata-rata usia 7-12 tahun 20.219 orang maka capaian indikator ini adalah 95.65%.

Capaian kinerja Prosentase APK SMPpada tahun 2019 sebesar 95.65% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 98,01% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 97,59%.

Capaian kinerja Prosentase APK SMP pada tahun 2019 sebesar 95,65% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 98,01% maka menunjukan bahwa terjadi penurunan kinerja sebesar 2,41%.

Capaian kinerja Prosentase APK SMP pada tahun 2019 sebesar 95,65% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 95,65%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan anggaran sebesar Rp.51.840.451.426 (*Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.50.307.161.060,81 (*Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah Delapan Puluh Satu Sen*) atau sebesar 97,04%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 97,04% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 99,95%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya minat anak untuk bersekolah, lebih memilih untuk membantu orang tua bekerja di sawah/kebun;
2. Masih rendahnya wawasan orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya;

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak yang tidak bersekolah agar mau bersekolah; dan
2. Memberikan pemahaman kepada kepada orang tua agar memahami pentingnya sekolah bagi anak-anaknya.

SASARAN 2	Meningkatnya Mutu Dan Prosentase Kelulusan

Sasaran ini diarahkan meningkatkan mutu kelulusan siswa baik secara kwalitas maupun kuantitas pada semua jenjang pendidikan yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan guna perolehan Ujian Nasioanl (UN) dan Ujian Sekolah (US) yang semakin baik.

Tabel 3.8
Jumlah dan Prosentase Kelulusan Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	Lulus	Tidak Lulus	(%)
SD/MI	3.582	3.582	-	100
SMP/MTs/SMPLB	3.108	3.108	-	100
Jumlah	**6.690**	**6.690**	**-**	**100**

Sumber data : Dari Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah kelulusan di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 sebanyak 6.690 siswa (100%), yaitu 3.582 siswa SD/MI (100%) dan 3.108 siswa SMP/MTs/SMPLB (100%).

Peningkatan angka kelulusan dari tahun 2019 pada semua jenjang pendidikan merupakan perwujudan komitmen pemerintah dan seluruh *stakeholders* untuk membenahi angka kelulusan di Kabupaten Rote Ndao sehingga setiap tahun angka kelulusan terus mengalami kemajuan dan peningkatan. Walaupun angka kelulusan mencapai target, tidak berarti tingkat kelulusan telah bebas dari masalah dan hambatan. Masalah yang dimaksud seperti sistem pembelajaran dan penataan pendidikan yang belum dikelola secara merata. Untuk itulah maka semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku dan penanggungjawab pendidikan maupun masyarakat telah mengambil langkah dan bersama untuk mengubah prestasi kelulusan yang demikian rendah menjadi lebih baik.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Mutu dan Prosentase Kelulusan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Realisasi		
1	Prosentase Kelulusan						
	a. SD	%	100	100	100	100	100
	b. SMP	%	100	100	100	100	100
	Rata-rata					**100**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata indikator kinerja sasaran Meningkatnya Mutu dan Prosentase Kelulusan pada tahun 2019 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Mutu dan Prosentase Kelulusan"*** adalah **100%** atau dikategorikan ***Sangat Berhasil.***

Analisis capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Prosentase kelulusan SD

   Prosentase Angka Kelulusan SD/MI tahun 2019 mencapai 100%dari jumlah murid yang mengikuti ujian sebanyak 3.582 siswa.

   Capaian kinerja Prosentase Angka Kelulusan SDpada tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

   Capaian kinerja Prosentase Angka Kelulusan SD pada tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100% maka menunjukan bahwa mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Prosentase Angka Kelulusan SDpada tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

2. Prosentase kelulusan SMP.

   Prosentase Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB tahun 2019 mencapai 100% dari jumlah murid yang mengikuti ujian sebanyak 3.108 siswa.

   Capaian kinerja Prosentase Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

   Capaian kinerja Prosentase Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100% maka menunjukan bahwa mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

   Capaian kinerja Jumlah Prosentase Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan anggaran sebesar Rp.51.840.451.426 (*Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.50.307.161.060,81 (*Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah Delapan Puluh Satu Sen*) atau sebesar 97,04%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 97,04% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi

sumber daya yang sangat signifikan dalam pencapaian kinerja sasaran. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah

1. Hambatan Internal.
   - Rendahnya motivasi belajar siswa (Kurangnya kesadaran murid/siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi UN dan US);
   - Rendahnya dukungan dan perhatian keluarga.
2. Hambatan Eksternal.
   - Rendahnya pemahaman dan aplikasi kurikulum ;
   - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung ;
   - Adanya kesenjangan dalam hal jumlah dan mutu guru ;
   - Kurangnya akses informasi ;
   - Rendahnya kualitas lulusan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah- langkah sebagai berikut:

1. Dengan program 5K yaitu : Ketersediaan pelayanan pendidikan; Keterjangkauan pelayanan pendidikan; Kualitas dan relevansi hasil pendidikan; Kesetaraan pendidikan; dan Kepastian pelayanan pendidikan;
2. Mendorong orang tua murid agar berpartisipasi aktif mempersiapkan dan memberikan dukungan kepada anak dalam menghadapi ujian;
3. Memberikan bantuan beasiswa bagi murid yang kurang mampu;
4. Pembenahan secara sungguh-sungguh pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar di kelas serta pembenahan proses belajar-mengajar bagi sekolah menengah yang masih tergolong rendah;
5. Dukungan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, pembenahan dan peningkatan kualifikasi guru terutama terhadap guru yang belum berijazah S-1 dan yang berlatar belakang pendidikan non-keguruan;

6. Pengelolaan pemerataan guru untuk menghindari penumpukan guru di perkotaan, sementara banyak sekolah di wilayah pedesaan kekurangan guru.

SASARAN 3	Meningkatnya Mutu Dan Akses Pendidikan Non Formal

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal yang terdapat di Kabupaten Rote Ndao guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program paket guna mewujudkan generasi yang lebih cerdas dan trampil.

Jumlah penduduk melek huruf di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 sebanyak 3.300 orang dari jumlah penduduk usia 10 tahun sebesar 3.451 orang sehingga prosentase angka melek huruf sebesar 95,62%.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Non Formal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Target 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Realisasi		
1	Prosentase Angka Melek Huruf	%	99,72	95,21	95,62	100,43	95,21
Rata-rata						**100,43**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan realisasi indikator kinerja Prosentase Angka Melek Huruf pada tahun 2019 sebanyak 95,62% dengan capaian kinerja sebesar 100,43%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Mutu dan Prosentase Kelulusan"*** adalah **100,43%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Capaian kinerja Prosentase Angka Melek Huruf pada tahun 2019 sebesar 95,62% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak sebesar 95,21% maka menunjukan bahwa telah melampaui target

dengan pencapaian kinerja sebesar 100,43%.

Capaian kinerja Prosentase Angka Melek Huruf pada tahun 2019 sebesar 95,62% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 99,72% maka menunjukan bahwa terjadi penurunan kinerja sebesar 4.10%.

Capaian kinerja Prosentase Angka Melek Huruf pada tahun 2019 sebesar 95,62% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 95,21% maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 100,43%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah program Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar Rp.124.104.000,- (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.117.720.000,- (*Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 94,86%. Realisasi anggaran sebesar 94,86% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100,43%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya yang signifikan dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah karena faktor intern dan ekstenal.

1. Faktor internal meliputi :
   a. Tidak adanya keinginan anak untuk sekolah;
   b. Tidak adanya motivasi/kemauan untuk belajar; dan
   c. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.
2. Faktor Eksternal meliputi :
   a. Faktor ekonomi;
   b. Lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung;
   c. Kurangnya pendekatan dari pihak sekolah untuk mengajak anak putus sekolah kembali ke bangku sekolah;
   d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya;

e. Suasana belajar yang kurang menyenangkan;
f. Guru yang terlalu keras dan kurang menyenangkan; dan
g. Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari guru.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah- langkah sebagai berikut:

1. Mendorong orang tua agar selalu memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan pendidikan anak;
2. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk menurunkan angka putus sekolah/*drop out*;
3. Membebaskan murid/siswa yang tidak mampu dari biaya pendidikan;
4. Peningkatan bantuan dana BOS dan BOS buku;
5. Pemberian beasiswa kepada murid yang tidak mampu;
6. Mendorong para guru agar dalam proses belajar mengajar harus mengedepankan pola pembinaan dan tanamkan budaya ramah dalam mengajar; dan
7. Membuka program paket.

SASARAN 4	**Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Perpustakaan**

Sasaran ini diarahkan untuk menumbuhkembangkan minat baca masyarakat yang dapat mendukung terciptanya masyarakat Rote Ndao yang cerdas. Manfaat perpustakaan di dalam segala bidang sangat diperlukan, khususnya di dunia pendidikan berperan penting yaitu membantu terselenggaranya pendidikan dengan baik. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah lewat unit kerja teknis terus berupaya dengan menambah koleksi buku perpustakaan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 melakukan penggadaan buku perpustakaan sebanyak 200 buku.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Buku	211	200	200	100	250
					Rata-rata	**100**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (Buku) pada tahun 2019 sebanyak 200 buku dengan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Perpustakaan"*** adalah **100%** atau di kategorikan **Sangat Berhasil.**

Capaian kinerja Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (Buku) pada tahun 2019 sebanyak 200 buku jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 200 buku maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (Buku) pada tahun 2019 sebanyak 200 buku jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 211 buku maka menunjukan bahwa terjadi penurunan kinerja sebesar 5,50%.

Capaian kinerja Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (Buku) pada tahun 2019 sebanyak 200 buku jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 250 buku maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebanyak 200 buku atau sebesar 80%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp.369.762.636,-*(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh*

Enam Rupiah) terealisasi sebesar Rp.369.205.272,- *(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)* atau sebesar 99,84%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 99,84% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Capaian target dengan kategori sangat berhasil bukan berarti masalah dan pelayanan perpustakaan telah memadai namun masih banyak hal yang perlu dibenahi seperti sarana dan prasarana perpustakaan, koleksi buku dan model penataan masih perlu diperbaiki. Untuk itu, membangun perpustakaan yang dapat memenuhi kebutukan masyarakat akan informasi harus mendapat dukungan penuh dari seluruh kalangan. Sehingga perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh informasi dapat tercapai dan yang terpenting perpustakaan mampu menumbuh kembangkan minat membaca masyarakat.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah:

1. Masih kurangnya koleksi buku-buku;
2. Belum maksimalnya waktu berkunjung yang disediakan;
3. Kurangnya dukungan pihak ketiga guna peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan;
4. SDM pengelola perpustakaan masih banyak yang belum memiliki keahlian seperti yang diharapkan; dan
5. Kurangnya kampanye dan promosi gemar membaca.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah- langkah sebagai berikut:

1. Perlunya menjalin kerjasama dengan stekholders guna mengatasi ketersediaan koleksi buku dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan secara kualitas dan kuantitas;

2. Membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis;
3. Penataan perpustakaan guna menarik minat masyarakat untuk masuk dan mendapatkan informasi;
4. Menggalakan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
5. Penataan layanan pustaka melalui Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) di sekolah-sekolah; dan
6. Menyediakan Layanan mobil perpustakaan keliling.

SASARAN 5	**Meningkatnya Mutu Sarana Dan Prasrana Pendidikan Pada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan**

Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang bermuara pada peningkatan Sumber Daya Manusia di wilayah Rote Ndao.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada tahun anggaran 2019 berupaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah-sekolah melalui pembangunan ruang kelas sebanyak 18 (delapan belas) ruang kelas.

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Target 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Ruang Kelas SD/SMP Yang Dibangun	Ruangan	16	18	18	100	18
Rata-rata						**100**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Jumlah ruang kelas SD/SMP Yang Dibangun pada tahun 2019 sebanyak 18 Ruangan dengan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan"*** adalah **100%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Capaian kinerja Jumlah Ruang Kelas SD/SMP Yang Dibangun pada tahun 2019 sebanyak 18 Ruangan jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 18 Ruangan maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Ruang Kelas SD/SMP Yang Dibangun pada tahun 2019 sebanyak 18 Ruangan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 16 Ruangan maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 112,50%.

Capaian kinerja Jumlah Ruang Kelas SD/SMP Yang Dibangun pada tahun 2019 sebanyak 18 Ruangan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 18 Ruangan maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalahProgram Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 3.853.341.000,- (*Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 3.816.071.528.- (*Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) atau 99,03%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 99,03% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Dari penjelasan diatas tergambar bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan suatu indikasi yang

menggambarkan bahwa orientasi dan perhatian pemerintah cukup serius. Sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung baru, perbaikan/rehab, pembangunan ruang perpustakaan, dan laboratorium terus di benahi.

Kemajuan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendidikan tidak terlepas dari dukungan seluruh *stakeholder*/pihak ketiga dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Rote Ndao.

Pencapaian sasaran ini masih mengalami kendala berupa kurangnya alokasi/terbatasnya ketersedian anggaran sehingga namun pembangunan ruangan kelas disesuaikan den melihat skala prioritas.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah-langkah yaitu :

1. Peningkatan bekerjasama dengan seluruh stekholders, pihak ketiga maupun NGO agar membantu ketersediaan sarana dan prasarana sekolah;
2. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD pemerintah kabupeten/kota; dan
3. Mendorong masyarakat agar budaya gotong royong dalam membangun dan memelihara sarana prasarana pendidikan terus digalakan.

SASARAN 6	**Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan**

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam keterlibatannya pada semua aspek pembangunan di Kabupaten Rote Ndao. Perempuan harus diberi peran untuk lebih mandiri sehingga dengan demikian kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara keselurahan akan meningkat. Keberhasilan peningkatan kesejahteraan

dan kemampuan perempuan akan mengarah pada kesetaraan gender agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik dan kesamaan hak menikmati hasil pembangunan.

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Realisasi		
1	Lembaga PUG Yang Aktif	Lbg	15	15	15	100	20
Rata-rata						**100**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Lembaga PUG Yang Aktif pada tahun 2019 sebanyak dengan 15 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan"*** adalah **100%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Capaian kinerja Lembaga PUG Yang Aktif pada tahun 2019 sebanyak 15 Lembaga jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 15 Lembaga maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Lembaga PUG Yang Aktif pada tahun 2019 sebanyak 15 Lembaga jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 15 Lembaga maka menunjukan bahwa telah mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Lembaga PUG Yang Aktif pada tahun 2019 sebanyak 15 Lembaga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak

20 lembaga maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 75%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.34.999.800,- (*Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.33.213.800,- (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*) atau sebesar 94,90%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 94,90% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih ada anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumahtangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga;
3. Masih minimnya sarana prasarana layanan penanganan korban kekerasan bagi perempuan; dan
4. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia di bidang pengarusutamaan gender.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Peningkatan pembinaan lembaga PUG sebagai pendorong peranserta perempuan, guna meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan;

3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi peranserta perempuan dalam membangun keluarga melalui pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan;
4. Peningkatan sosialisasi PUG; dan
5. Peningkatan bekerjasama dengan seluruh stekholders, pihak ketiga maupun NGO agar membantu advokasi, pemberdayaan perempuan dan penyesiaan sarana dan prasarana.

SASARAN 7	**Meningkatnya Perlindungan Anak**

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Realisasi		
1	Lembaga Perlindungan Anak Yang Aktif	Lbg	2	2	2	100	12
Rata-rata						**100**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Lembaga Perlindungan Anak Yang Aktif pada tahun 2019 sebesar 2 (dua) lembaga dengan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Perlindungan Anak"** adalah **100%** atau di kategorikan **Sangat Berhasil.** Capaian kinerja Lembaga Perlindungan Anak Yang Aktif pada tahun

2019 sebanyak 2 (dua) lembaga jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 2 (dua) lembaga maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Lembaga Perlindungan Anak Yang Aktif pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) lembaga jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 2 (dua) lembaga maka menunjukan bahwa telah mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Lembaga Perlindungan Anak Yang Aktif pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) lembaga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 12 (dua belas) lembaga maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebanyak 2 (dua) lembaga atau 16,67%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak dengan dukungan anggaran sebesar Rp.293.124.600,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.263.939.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau sebesar 90,04%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 90,04% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor terkait;
2. Masih minimnya sarana prasarana di bidang perlindungan anak; dan
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang perlindungan anak.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi dalam rangka penguatan dan pembentukan kelembagaan Kader Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Satgas Perlindungan Perempuan Anak (PPA), Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA), dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
2. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Trafficking, Bullying, pencegahan kekerasan seksual pada anak, dan *Three Ends* (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Akhiri Perdagangan Manusia, dan Akhiri Kesenjangan Ekonomi pada Perempuan;
3. Pembangunan dan optimalisasi sarana prasarana di bidang perlindungan anak; dan
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas di bidang perlindungan anak.

SASARAN 8	**Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Dalam Segala Bidang Baik Lokal, Regional Maupun Nasional**

Sasaran ini diarahkan memberdayakan pemuda dan mendorong partisipasi aktifnya dalam seluruh aspek pembangunan baik secara lokal, regional maupun nasional. Hambatan yang paling utama dihadapi dari sasaran ini adalah banyak organisasi kepemudaan yang tidak aktif dan terbatasanya anggaran untuk pembinaan organisasi kepemudaan sehingga dalam mencapai sasaran ini dengan melakukan upaya penyediaan dana demi terlaksananya kegiatan kegiatan kepemudaan dan mendorong organisasi kepemudaan yang tidak aktif agar diaktifkan kembali.

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
Dalam Segala Bidang Baik Lokal, Regional Maupun Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJDMD 2019
				Target	Real.		
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Aktif Terbina	Organisasi	7	12	10	83,33	12
2	Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	62	150	130	86,67	150
	Rata-rata					**85,00**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dalam Segala Bidang baik Lokal, Regional Maupun Nasionalpada tahun 2019 sebesar 85,00%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dalam Segala Bidang baik Lokal, Regional Maupun Nasional"*** adalah **85,00%** atau dikategorikan **Berhasil.**

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Aktif Terbina.

   Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Aktif Terbina oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sebanyak 10 (sepuluh) organisasi kepemudaan.

   Capaian kinerja Organisasi Kepemudaan Yang Aktif Terbina pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) organisasi jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) organisasi maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 71,43%.

Capaian kinerja Organisasi Kepemudaan Yang Aktif Terbina pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) organisasi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh) organisasi maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 142,86%.

Capaian kinerja Organisasi Kepemudaan Yang Aktif Terbina pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) organisasi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 12 (dua belas) organisasi maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 83,33%.

2. Indikator Jumlah Pemuda Berprestasi.

Pemuda Yang Berprestasi di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2018 sebanyak 62 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 130 orang.

Capaian kinerja Pemuda Yang Berprestasi pada tahun 2019 sebanyak 130 orang jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 150 orang maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 86,67%.

Capaian kinerja Pemuda Yang Berprestasi pada tahun 2019 sebanyak 130 orang jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 62 orangmaka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 209,68%.

Capaian kinerja Pemuda Yang Berprestasi pada tahun 2019 sebanyak 130 orang jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada penetapan kinerja pemerintah tahun 2019 sebanyak 150 orang maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 86,67%.

Program yang mendukung capaian kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp.515.000.000,- (*Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.514.355.600,- (*Lima Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*) atau sebesar 99,87%.

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 99,87% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 79,05%, maka menunjukan bahwa belum terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia di bidang kepemudaan.
3. Masih minimnya dukungan dana di bidang pengembangan kepemudaan; dan
4. Masih minimnya sarana prasarana di bidang perlindungan anak.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia di bidang kepemudaan;
3. Peningkatan alokasi dana di bidang pengembangan kepemudaan; dan
4. Pembangunan dan optimalisasi sarana prasarana di bidang perlindungan anak.

MISI IV	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DI DUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN

SASARAN 1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan produksi produksi dan produktivitas Pertanian dan Perikanan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk meningkatkan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah.

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Jumlah Produksi Gabah	Ton	107.892,90	107,892,90	108.883,90	100,92	65.363
2	Jumlah Produksi Jagung	Ton	14.124,80	14.124,80	14.618,70	103,50	8,950
3	Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	4.816	4.816	2.547,90	52,90	291,42
4	Jumlah Produksi Sorgum	Ton	17,80	17,80	16,90	94,94	114,68
5	Jumlah Produksi Kacang Tanah	Ton	916	916,00	628,00	68,56	5.293
6	Jumlah Gula Air	Ton	150,00	150,00	150,00	100	149.67
7	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	3.374	3.374,00	3.445,42	102,12	3.785.7
8	Jumlah Jambu Mete	Ton	75,00	75,00	45,54	60,72	78

9	Jumlah Produksi Tangkap	Ton	3.361	3.361	3.696	109,97	3.276
10	Jumlah Produksi RTP Tangkap	Ton	2.890	2,890	3.539	122,46	7.250
11	Jumlah Produksi Budidaya	Ton	15.777	15,777	16.542	104,85	8.280
12	Jumlah RTP Budidaya	KK	10.453	10,453	10.453	100	11.344
13	Jumlah Pemanfaatan Budidaya	Ha	2.214	2.214	2.214	100	2.267
	Rata – rata					**93,92**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan pada tahun 2019 sebesar 93,92%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan"*** adalah **93,92%** atau di kategorikan **Sangat Berhasil.**

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Produktivitas Gabah.

   Capaian kinerja Produktivitas Gabah pada tahun 2019 sebanyak 108.883,90 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 107.892,90 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 100,92%.

   Capaian kinerja Produktivitas Gabah pada tahun 2019 sebanyak 108.883,90 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak107.892,90 ton maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja dengan pencapaian kinerja sebesar 100,92%.

Capaian kinerja Produktivitas Gabah pada tahun 2019 sebanyak 108.883,90 ton jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 65.363 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 166,58%

2. Indikator Jumlah Produksi Jagung.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Jagung pada tahun 2019 sebanyak 14.618,70 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 14.124,80 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 103,50%.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Jagung pada tahun 2019 sebanyak 14.618,70 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 14.618,70 ton maka menunjukan bahwa mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Jagung pada tahun 2019 sebanyak 14.618,70 ton jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 8.950 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 163,34%.

3. Indikator Jumlah Bawang Merah.

   Capaian kinerja Jumlah Bawang Merah pada tahun 2019 sebanyak 2.547,90 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 4.816 ton maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 52,90%.

   Capaian kinerja Jumlah Bawang Merah pada tahun 2019 sebanyak 2.547,90 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 4.816 ton maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebesar 47,10%.

   Capaian kinerja Jumlah Bawang Merah pada tahun 2019 sebanyak 2.547,90 ton jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 291,42 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui

target dengan pencapaian peningkatan produksi sebanyak 2518,48 ton.

4. Indikator Jumlah Produksi Sorgum.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Sorgum pada tahun 2019 sebanyak 16,90 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 17,80 ton maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 94,94%.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Sorgum pada tahun 2019 sebanyak 16,90 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 17,80 ton maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebesar 5,06%.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Sorgum pada tahun 2019 sebanyak 16,90 tonjika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 114,68 ton maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 14,74%.

5. Indikator Jumlah Produksi Kacang Tanah.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Kacang Tanah pada tahun 2019 sebanyak 628 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 916 ton maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 68,56%.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Kacang Tanah pada tahun 2019 sebanyak 628 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 916 ton maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebesar 31,44%.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Kacang Tanah pada tahun 2019 sebanyak 628 ton jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 5.293 ton maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 11,86%.

6. Indikator Jumlah Produksi Gula Air.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Gula Air pada tahun 2019

sebanyak 150 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 150 ton maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Produksi Gula Air pada tahun 2019 sebanyak 150 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 150 ton maka menunjukan bahwa mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Produksi Gula Air pada tahun 2019 sebanyak 150 ton jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 149,67 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 100,22%.

7. Indikator Jumlah Produksi Kelapa.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Kelapa pada tahun 2019 sebanyak 3.445,42 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 3.374 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 102,12%.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Kelapa pada tahun 2019 sebanyak 3.445,42 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 3.374 ton maka menunjukan bahwa melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan pencapaian kinerja sebesar 102,12%.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Kelapa pada tahun 2019 sebanyak 3.374 ton jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 3.785,7 ton maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 91,01%.

8. Indikator Jumlah Jambu Mete.

   Capaian kinerja Jumlah Jambu Mete pada tahun 2019 sebanyak 45,54 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 75 ton maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 60,72%.

Capaian kinerja Jumlah Jambu Mete pada tahun 2019 sebanyak 45,54 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 75 ton maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebesar 39,28%.

Capaian kinerja Jambu Mete pada tahun 2019 sebanyak 45,54 tonjika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 78 ton maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 58,38%.

9. Indikator Jumlah Produksi Tangkap.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Tangkap pada tahun 2019 sebanyak 3.696 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 3.361 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 109,97%.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Tangkap pada tahun 2019 sebanyak 3.696 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 3.361 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 109,97%.

   Capaian kinerja Jumlah Produksi Tangkap pada tahun 2019 sebanyak 3.696 ton jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 3.276 ton maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 112,82%.

10. Indikator Jumlah Produksi RTP Tangkap.

    Capaian kinerja Jumlah Produksi RTP Tangkap pada tahun 2019 sebanyak 3.539 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 2.890 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 122,46%.

    Capaian kinerja Jumlah Produksi RTP Tangkap pada tahun 2019 sebanyak 3.539 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018

sebanyak 2.890 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 122,46%.

Capaian kinerja Jumlah Produksi RTP Tangkap pada tahun 2019 sebanyak 3.539 ton jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 7.250 ton maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 48,81%.

11. Indikator Jumlah Produksi Budidaya.

    Capaian kinerja Jumlah Produksi Budidaya pada tahun 2019 sebanyak 16.542 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 15.777 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 104.85%.

    Capaian kinerja Jumlah Produksi Budidaya pada tahun 2019 sebanyak 16.542 ton jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 15.777 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 104.85%.

    Capaian kinerja Jumlah Produksi Budidaya pada tahun 2019 sebanyak 16.542 tonjika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 8.280 ton maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 199,78%.

12. Indikator Jumlah RTP Budidaya.

    Capaian kinerja Jumlah RTP Budidaya pada tahun 2019 sebanyak 10.453 KK jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 10.453 KK maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

    Capaian kinerja Jumlah RTP Budidaya pada tahun 2019 sebanyak 10.453 KK jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 10.453 KK maka menunjukan bahwa mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah RTP Budidaya pada tahun 2019 sebanyak 10.453 KK jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 11.344 KK maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 92,15%.

13. Indikator Jumlah Pemanfaatan Budidaya.

Capaian kinerja Jumlah Pemanfaatan Budidaya pada tahun 2019 sebanyak 2.214 Ha jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 2.214 Ha maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Pemanfaatan Budidaya pada tahun 2019 sebanyak 2.214 Ha jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 2.214 Ha maka menunjukan bahwa mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Pemanfaatan Budidaya pada tahun 2019 sebanyak 2.214 Ha jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 2.267 Ha maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 97,66%.

Tabel 3.17

Program dan Anggaran Pendukung Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan

Program	Anggaran		
	Jumlah (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
1. Peningkatan Ketahanan Pangan	5.195.306.449	5.130.503.260	98,75
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebun	310.000.000	308.227.360	99,43
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	226.960.500	222.457.500	98,02
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	774.015.450	766.848.000	99,07

5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.427.300.000	1.404.025.807	98,37
Jumlah	**7.933.582.399**	**7.832.061.927**	**98,72**

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) program dengan anggaran sebesar Rp.7.933.582.399,- (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.7.832.061.927,- (*Tujuh Miliar Delapan ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar 98,72%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 98,72% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 93,92%, maka menunjukan bahwa belum terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian sasaran kinerja.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Musim kemarau yang panjang;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia di bidang pertanian dan perikanan;
3. Masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah di bidang pertanian dan perikanan; dan
4. Masih minimnya sarana prasarana di pertanian dan perikanan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Pembangunan dan rehabilitas sumber-sumber air dan embung bagi irigasi;
2. Peningkatan Sumberdaya Manusia di bidang pertanian dan perikanan baik secara kualitas maupun kuantitas;

3. Peningkatan anggaran pembiayaan program dan kegiatan di bidang pertanian dan perikanan; dan
4. Pembangunan dan optimalisasi sarana prasarana di pertanian dan perikanan.

SASARAN 2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata baik yang berskala pelayanan kawasan wisata, maupun pada tiap obyek dan daya tarik wisata. Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang dilakukan dengan pola pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga potensi dan kualitas lingkungan yang ada tetap dapat dipelihara dan dikembangkan secara arif dan bijaksana.

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Jumlah Akomodasi Pariwisata						
	- Hotel/ Losmen	Unit	52	12	52	433,33	12
	- Kamar	Buah	327	150	335	223,33	150
	- Tempat Tidur	Buah	530	287	530	184,67	287
Rata – rata						**280,45**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwarata-rata realisasi indikator kinerja Jumlah Akomodasi Pariwisata pada tahun 2019 sebesar

280,45%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata"*** adalah **280,45%** atau di kategorikan **Sangat Berhasil.**

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Hotel.

   Capaian Jumlah Hotel pada tahun 2019 sebanyak 52 hotel jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 12 hotel maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 433,33%.

   Capaian Jumlah Hotel pada tahun 2019 sebanyak 52 hotel jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 52 hotel maka menunjukan bahwa mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

   Capaian Jumlah Hotel pada tahun 2019 sebanyak 52 hotel jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 12 hotel maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 433,33%.

2. Indikator Jumlah Kamar.

   Capaian Jumlah Kamar pada tahun 2019 sebanyak 335 buah jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 150 buah maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 223,33%.

   Capaian Jumlah Kamar pada tahun 2019 sebanyak 335 buah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 327 buah maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 102,45%.

   Capaian Jumlah Kamar pada tahun 2019 sebanyak 335 buah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 150 buah maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 223,33%.

3. Indikator Jumlah Tempat Tidur.

   Capaian Jumlah Tempat Tidur pada tahun 2019 sebanyak 530 buah jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 287 buah maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 184,67%.

   Capaian Jumlah Tempat Tidur pada tahun 2019 sebanyak 530 buahjika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 530 buah maka menunjukan bahwa mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian kinerja sebesar 100%.

   Capaian Jumlah Tempat Tidur pada tahun 2019 sebanyak 530 buah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 287 buah maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 184,67%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan alokasi anggaran Rp.855.000.000,-*(Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)* dan realisasi sebesarRp.754.100.300,- *(Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Rupiah)* atau sebesar 88,20%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 88,20% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 280,45%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya yang sangat signifikan dalam mencapai kinerja tersebut.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia kepariwistaan; dan
3. Masih minimnya sarana prasarana kepariwistaan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia kepariwistaan; dan
3. Pembangunan dan optimalisasi sarana prasarana kepariwistaan.

SASARAN 3	Meningkatnya Kunjungan Wisata

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Rote Ndao karena sektor pariwisata merupakan sektor andalan dan menjadi lokomotif bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao. Kebijakan pembangunan pariwisata guna meningkatkan angka kunjungan wisata menjadi skala prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, hal ini disebabkan karena kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan perekonomian masih relatif kecil, sementara Kabupaten Rote Ndao memiliki aset, potensi dan daya tarik pariwisata yang memiliki keunikan dan keunggulan.

Tabel 3.19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kunjungan Wisata

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan :						
	- Wisatawan Manca Negara	Org	2.060	2.581	2.481	96,13	2.581
	- Wisatawan Nusantara	Org	1.801	2.700	2.057	76,19	2.700
	- Rata-rata Lama Menginap	Hari	14	7	10	142,86	7,0
	Rata – rata					**105,06**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2019 sebesar 105,06% sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Kunjungan Wisata"*** adalah **105,06%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.

   Capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 2.481 wisatawan jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 2.581 wisatawan maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 96,13%.

   Capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 2.481 wisatawan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 2.060 wisatawan maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 120,44%.

   Capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 2.481 wisatawan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 2.581 wisatawan maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 96,13%.

2. Indikator Jumlah Wisatawan Nusantara.

   Capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara pada tahun 2019 sebanyak 2.057 wisatawan jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 2.700 wisatawan maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 76,19%.

   Capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara pada tahun 2019 sebanyak 2.057 wisatawan jika dibandingkan dengan capaian

tahun 2018 sebanyak 1.801 wisatawan maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 114,21%.

Capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara pada tahun 2019 sebanyak 2.057 wisatawan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 2.700 wisatawan maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 76,19%.

3. Indikator Rata–Rata Lama Menginap.

   Capaian kinerja Rata–Rata Lama Menginap pada tahun 2019 sebanyak 10 hari jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 7 hari maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 142,86%.

   Capaian kinerja Rata–Rata Lama Menginap pada tahun 2019 sebanyak 10 hari jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 14 hari maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebesar 28,57%

   Capaian kinerja Rata–Rata Lama Menginap pada tahun 2019 sebanyak 10 hari jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 7 hari maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 142,86%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan alokasi anggaran Rp.855.000.000,- *(Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)* terealisasi sebesar Rp.754.100.300,- *(Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Rupiah)* atau sebesar 88,20%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 88,20% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 105,06%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya yang sangat signifikan dalam mencapai kinerja tersebut.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia kepariwisataan; dan
3. Masih minimnya sarana prasarana kepariwisataan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia kepariwisataan; dan
3. Pembangunan dan optimalisasi sarana prasarana kepariwisataan.

SASARAN 4	Meningkatnya Jumlah Industri Berbasis Pertanian

Sasaran ini bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan UMKM guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM sehingga dapat terwujudnya insan atau pelaku UMKM yang berkualitas dan bermartabat menuju sejahtera yang berbasis pada sektor pertanian.

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Jumlah Industri Berbasis Pertanian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1.	Jumlah UMKM	Unit	415	182	952	523,08	182
Rata – rata						**523,08**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Jumlah UMKM pada tahun 2019 sebesar 952 unit dengan capaian kinerja sebesar 523,08%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Jumlah Industri Berbasis Pertanian"*** adalah **523,08%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Capaian kinerja Jumlah UMKM pada tahun 2019 sebanyak 952 unit jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 182 unit maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 523,08%,

Capaian kinerja Jumlah UMKM pada tahun 2019 sebanyak 952 unit jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 415 unit maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 229,40%.

Capaian kinerja Jumlah UMKM pada tahun 2019 sebanyak 952 unit jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 182 unit maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 523,08%,

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan anggaran sebesar Rp.295.000.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.289.094.200,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*) atau sebesar 97,99%.

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 97,99% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 523,08% maka menunjukan bahwa belum terjadi efisiensi sumber daya yang sangat siginifikan dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia UMKM;

3. Masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah bagi pembinaan dan pengembangan usaha UMKM; dan
4. Masih terbatasnya sumber-sumber permodalan bagi UMKM.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia perkoperasian;
3. Peningkatan alokasi anggaran bagi pembinaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
4. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM melalui kerjasama dengan perbankan.

SASARAN 5	Meningkatnya Jumlah dan Mutu Koperasi Yang Sehat

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif dan koperasi yang berkualitas dalam mewujudkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Jumlah dan Mutu Koperasi Yang Sehat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1.	Jumlah koperasi aktif						
	- Jumlah Koperasi	Unit	192	217	172	79,26	217

	- Jumlah Anggota	Org	12.058	12.697	11.957	94,17	12.697
	- Jumlah Modal Sendiri	Rp	35.230. 801.092	25,000, 000,000	33,759, 821,212	135,04	24.949.442
Rata – rata						**102,82**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2019 sebesar 102,82%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Jumlah dan Mutu Koperasi Yang Sehat"*** adalah **102,82%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Koperasi.

   Capaian kinerja Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2019 sebanyak 172 unit jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 217 unit maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 79,26%.

   Capaian kinerja Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2019 sebanyak 172 unit jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 192 unit maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebesar 10,42%

   Capaian kinerja Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2019 sebanyak 172 unit jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 217 unit maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 79,26%.

2. Jumlah Anggota.

   Capaian kinerja Jumlah Anggota pada tahun 2019 sebanyak 11.957 anggota jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 12.697 anggota maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 94,17%.

Capaian kinerja Jumlah Anggotapada tahun 2019 sebanyak 11.957 anggota jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 12.058 anggota maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebesar 0,84%.

Capaian kinerja Jumlah Anggota pada tahun 2019 sebanyak 11.957 anggota jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak sebanyak 12.697 anggota maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 94,17%.

3. Jumlah Modal Sendiri.

Capaian kinerja Jumlah Modal Sendiri pada tahun 2019 sebesar Rp.33.759.821.212,- (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*) jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000.000,- (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*) maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 135,04%.

Capaian kinerja Jumlah Modal Sendiri pada tahun 2019 sebesar Rp.33.759.821.212,- (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar Rp.35.230.801.092,- (*Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*) maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebesar 4,18%.

Capaian kinerja Jumlah Modal Sendiri pada tahun 2019 sebesar Rp.33.759.821.212,- (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar Rp.24.949.442,- (*Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan peningkatan

besaran modal sebanyak Rp.33.734.871.770,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*)

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- *(Dua Ratus Juta Rupiah)* terealisasi sebesar Rp.198.410.000,- *(Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Rupiah)* atau sebesar 99,20%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 99,20% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 102,82%, maka menunjukan bahwa belum terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi.
3. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia perkoperasian; dan
4. Masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah bagi pembinaan dan pengembangan usaha koperasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi;
2. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjadikan usaha koperasi sebagai penunjang perekonomian masyarakat;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya Manusia perkoperasian; dan
4. Peningkatan dukungan dana pembinaan dan pengembangan usaha koperasi.

MISI V	:	**MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

SASARAN 1	**Menurunkan Gizi Buruk**

Sasaran ini diarahkan untuk Upaya perbaikan gizi masyarakat demi meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan program gizi yaitu meningkatkan kesadaran gizi keluarga yang selanjutnya akan meningkatkan status gizi masyarakat.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi balita sesuai standar, meningkatkan capaian sanitasi berbasis masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) mengenai gizi bagi masyarakat serta meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam mengatasi persoalan gizi di Kabupaten Rote Ndao.

Pemantauan pertumbuhan balita merupakan upaya untuk mengetahui status gizi anak balita. Salah satu kegiatan berbasis masyarakat untuk melakukan pemantauan pertumbuhan terhadap balita adalah Posyandu oleh karena itu peran serta masyarakat dengan mengikutsertakan balitanya untuk ditimbang di Posyandu memberikan andil yang sangat besar terhadap pencapaian kinerja sasaran ini.

Tabel 3.22
Jumlah Balita Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk Tahun 2019
PUSKEMAS Se-Kebupaten Rote Ndao

NO.	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA	
		GIZI KURANG	GIZI BURUK
1.	Eahun	61	19
2.	Sotimori	27	7
3.	Korbafo	25	-

4.	Sonimanu	41	18
5.	Feapopi	50	13
6.	Ba'a	68	32
7.	Oele	48	20
8.	Busalangga	88	31
9.	Oelaba	106	-
10.	Batutua	177	10
11.	Ndao	48	1
12.	Delha	20	6
Jumlah		**797**	**197**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab.Rote Ndao, Tahun 2020

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Jumlah Balita Gizi Kurang di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 sebanyak 797 balita dan bahwa Jumlah Balita Gizi Buruk sebanyak 197 balita. Balita gizi kurang terbanyak terdapat di Puskesmas Batutua dan Balita gizi buruk terbanyak terdapat di Puskesmas Ba'a.

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunkan Gizi Buruk

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real		
1	Presentase Balita Kurang Gizi	%	4,98	5,6	8,03	56,61	5,6
2	Presentase Balita Gizi Buruk	%	0,24	0,5	0,52	96,00	0,5
Rata-Rata						**76,31**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Menurunkan Gizi Buruk pada tahun 2019 sebesar 76,31%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ***"Menurunkan Gizi Buruk"*** adalah **76,31%** atau dikategorikan **Berhasil.**

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Indikator Presentase Balita Kurang Gizi.

   Capaian kinerja Presentase Balita Kurang Gizi pada tahun 2019 sebesar 8,03% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun sebesar 5,6% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 56,61%.

   Capaian kinerja Presentase Balita Kurang Gizi pada tahun 2019 sebesar 8,03% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 4,98% maka menunjukan bahwa Presentase Balita Kurang Gizi mengalami kenaikan sebesar 3,05% dengan pencapaian kinerja sebesar 38,76% sehingga mengalami penurunan kinerja sebesar 61,24%.

   Capaian kinerja Presentase Balita Kurang Gizi pada tahun 2019 sebesar 8,03% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 5,6% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 56,61%.

2. Indikator Presentase Balita Gizi Buruk.

   Capaian kinerja Presentase Balita Gizi Buruk pada tahun 2019 sebesar 0,52% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun sebesar 0,5% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 96,00%.

   Capaian kinerja Presentase Balita Gizi Buruk pada tahun 2019 sebesar 0,52% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0,24% maka menunjukan bahwa Presentase Balita Gizi Buruk mengalami kenaikan sebesar 0,28% dengan pencapaian kinerja

sebesar -16,67% sehingga terjadi penurunan kinerja 116,67%.

Capaian kinerja Presentase Balita Gizi Buruk pada tahun 2019 sebesar 0,52% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 0,5% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 96,00%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.341.612.068,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.276.485.200,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*) atau sebesar 80,93%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 80,93% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 76,31%, maka menunjukan bahwa belum terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran. Capaian kinerja ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat sehingga perlu adanya penyuluhan terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak serta pemberian makanan tambahan atau makanan pendamping ASI.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih rendahnya penerapan pola hidup sehat, bersih dan bergizi dalam keluarga;
3. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk membawa anak dan bayi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, pustu dan posyandu;
4. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia tenaga medis dan paramedis; dan
5. Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi;
2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan pola hidup sehat, bersih dan bergizi dalam keluarga;
3. Peningkatan sosialiasi dan edukasi bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, pustu dan posyandu melalui optimalisasi peran kader posyandu dan bidan desa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya Manusia tenaga medis dan paramedis; dan
5. Peningkatan pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan.

SASARAN 2	**Menurunnya Angka Kesakitan Dan Kematian Akibat Penyakit**

Sasaran ini diarahkan guna meningkatkan derajat kesehatan penduduk yang mana dapat juga dilihat dari angka kesakitan (morbiditas) yang menunjukkan ada tidaknya keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktifitas lainnya serta berujung pada kematian. Keluhan yang dimaksud mengindikasikan adanya jenis penyakit tertentu yang dirasakan penduduk. Semakin tinggi angka morbiditas, maka semakin banyak penduduk mengalami gangguan kesehatan. Konsekuensi dari membaiknya status kesehatan penduduk antara lain penduduk menjadi lebih produktif dalam bekerja, juga biaya kesehatan yang harus dikeluarkan berkurang serta menurunnya angka kematian akibat penyakit.

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Muntaber/Diare	Kasus	2.645	2.645	1.724	134,82	0
2	Demam Berdarah	%	0	0	1,61	98,39	0
3	Jumlah angka kesakitan malaria 4/1.000 penduduk menjadi 0,75/1.000 penduduk	Per 1.000	0,35	0,75	0,10	186,67	0
4	TBC	Per 100.000	77	109	72,98	133,05	3
5	Kusta	Per 10.000	0,32	0,14	0,48	-142,86	0,14
Rata-rata						**82,01**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit pada tahun 2019 sebesar 82,01%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit"*** adalah **82,01%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1) Indikator Muntaber/Diare

Penderita diare ditemukan dan ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun. Persentase Diare yang ditemukan dan ditangani pada Tahun 2019 yaitu 100% atau sebanyak 1.724 orang dari jumlah populasi 172.104 penduduk. Semua penderita dilayani sesuaidengan standar operasional prosedur pelayanan.

Capaian indikator kinerja Muntaber/Diare tahun 2019 sebanyak 1.724 kasus jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebanyak

2.645 kasus maka menunjukan bahwa terjadi penurunan kasus Muntaber/Diare sebanyak 921 kasus dan melampaui target kinerja dengan capaian kinerja sebesar 134,82%.

Capaian indikator kinerja penyakit Muntaber/Diare tahun 2019 sebanyak 1.724 jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 2.645 kasus maka menunjukan bahwa terjadi penurunan jumlah kasus Muntaber/Diare sebanyak 921 kasus dengan peningkatan kinerja 134,82%.

Capaian indikator kinerja penyakit Muntaber/Diare tahun 2019 sebanyak 1.724 kasus jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 0 kasus, maka capaian kinerja ini belum mencapai target. Namun prosentase penurunan kasus jumlah Muntaber/Diare antara tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 34,82% menunjukan komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di bidang kesehatan dalam upaya mengurangi jumlah kasus Muntaber/Diare setiap tahun guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2) Indikator Demam Berdarah

Penanganan Demam Berdarah (DBD) di Kabuaten Rote Ndao pada tahun 2019 yang ditangani sebanyak 62 kasus yaitu 61 kasus positif yang ditangani (98,39%) dan 1 orang meninggal dunia (1,61%). Capaian indikator kinerja penanganan Demam Berdarah (DBD) tahun 2019 sebesar 1,61% (1 orang meninggal dunia) jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0%, maka belum mencapai target.

Capaian indikator kinerja penanganan DBD tahun 2019 sebesar 1,61% (1 orang meninggal dunia) jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0%, maka belum mencapai target. Demikian pula realisasi capaian kinerja penyakit Muntaber/Diare tahun 2019 sebesar 1,61% (1 orang meninggal dunia) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 0%, maka capaian kinerja ini belum mencapai target.

Meskipun capaian indikator kinerja penanganan DBD belum mencapai target namun kinerja pelayanan kesehatan (pengobatan pasien) kasus DBD mencapai 61 pasien selamat (98,39%) dari total jumlah kasus DBD sebanyak 62 kasus. Seluruh penanganan kasus DBD dilaksanakan sesuai standar pelayanan kesehatan. Faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja ini adalah keterbatasan sumber daya berupa tenaga medis (spesialis) dan stok ketersediaan darah pada saat terjadi wabah DBD serta infrastruktur pendukung lainnya.

3) Indikator Malaria.

Angka Kesakitan Malaria (*Annual Paracite Index-API*) merupakan jumlah penderita malaria dengan konfirmasi laboratorium positf terhadap di wilayah tertentu dan waktu tertentu per 1.000 penduduk. Pada tahun 2019 jumlah penderita malaria sebanyak 16 orang dibandingkan dengan populasi 172.104 penduduk sehingga angka kesakitan malaria pada tahun 2019 atau 0,09/1.000 penduduk dari target 0,75/1000 penduduk.

Capaian Angka Kesakitan Malaria pada tahun 2019 sebesar 0,10/1.000 penduduk jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0,75/1000 penduduk maka menunjukan bahwa terjadi penurunan Angka Kesakitan Malaria sebesar 0,65 dari target dan melampaui target kinerja dengan capaian kinerja sebesar 186,67%.

Capaian Angka Kesakitan Malaria pada tahun 2019 sebesar 0,10/1.000 penduduk jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0,35/1.000 penduduk maka menunjukan bahwa terjadi penurunan Angka Kesakitan Malaria sebesar 0,25 dari tahun sebelumnya dengan peningkatan kinerja sebesar 171,43%.

Capaian Angka Kesakitan Malaria pada tahun 2019 sebesar 0,10/1.000 penduduk jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 maka menunjukan belum mencapai target kinerja yaitu sebesar 0/1.000 penduduk.

4) Indikator Tuberkulosis (TBC)

Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (*Case Notification Rate*) adalah cakupan seluruh pasien TB yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 peduduk dalam suatu wilayah. Angka Notifikasi TB di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 sebesar 72,98/100.000 penduduk dengan jumlah kasus TB positif sebanyak 121 kasus.

Capaian Angka Notifikasi TB tahun 2019 sebesar 72,98/100.000 penduduk jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 109/100.000 penduduk maka menunjukan bahwa terjadi penurunan Angka Notifikasi TB sebesar 36,02 dan melampaui target kinerja dengan capaian kinerja sebesar 133,05%.

Capaian Angka Notifikasi TB tahun 2019 sebesar 72,98/100.000 penduduk jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 77/100.000 penduduk maka menunjukan bahwa terjadi penurunan Angka Notifikasi TB sebesar 4,2 dengan peningkatan kinerja sebesar 105,22%.

Capaian Angka Notifikasi TB tahun 2019 sebesar 72,98/100.000 penduduk jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019, maka menunjukan belum mencapai target kinerja yaitu sebesar sebesar 3/100.000 penduduk.

5) Indikator Prevalensi Kusta.

Prevalensi Kusta adalah kasus kusta terdaftar (kasus baru dan kasus lama)0,14/10.000 penduduk suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 8 orang penderita kusta jumlah kasus (penderita kusta lama dan penderita baru) dengan prevelensi kusta pada tahun 2019 adalah sebesar 0,48/10.000 penduduk.

Capaian Angka Prevalensi Kusta tahun 2019 sebesar 0,48/10.000 penduduk jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0,14/10.000 penduduk maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan

Angka Prevalensi Kusta sebesar 0,34 dan belum mencapai target dengan capaian kinerja sebesar -142,86%.

Capaian Angka Prevalensi Kusta pada tahun 2019 sebesar 0,48/10.000 penduduk jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0,32/10.000 penduduk maka menunjukan bahwa capaian kinerja ini menurun dari tahun sebelumnya dengan kenaikan Angka Prevalensi Kusta sebesar 0,16 dengan penurunan kinerja sebesar 50%.

Capaian Angka Prevalensi Kusta pada tahun 2019 sebesar 0,48/10.000 penduduk jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 maka menunjukan bahwa belum mencapai target.

Tabel 3.25
Program dan Anggaran Pendukung Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit

Program	Anggaran		
	Jumlah (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.984.390.229	3.963.210.245	74,37
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	29.351.885.973	19.923.452.535	67,87
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.492.355.613	1.182.611.231	79,24
4. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita	42.745.500	27.635.500	64,65
5. Program Pemberantasan TB	1.600.000	1.600.000	100
Jumlah	**34.872.977.315**	**25.098.509.511**	**71,97**

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp.34.872.977.315,- (*Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga*

Ratus Lima Belas Rupiah) terealisasi sebesar Rp.25.098.509.511,-(*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*) atau sebesar 71,97%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 71,97% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 82,01%, maka terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih rendahnya penerapan pola hidup sehat, bersih dan bergizi dalam keluarga;
3. Masih rendahnya motivasi masyarakat ke puskesmas, pustu dan fasilitas kesehatan lainnya pada saat sakit;
4. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia tenaga medis dan paramedis; dan
5. Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi;
2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan pola hidup sehat, bersih dan bergizi dalam keluarga;
3. Peningkatan sosialiasi dan edukasi bagi masyarakat ke puskesmas, pustu dan fasilitas kesehatan lainnya;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya Manusia tenaga medis dan paramedis; dan
5. Peningkatan pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan.

SASARAN 3	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB

Sasaran ini diarahkan untuk mengedepankan kualitas dan akses pelayanan KB dan menuntut perubahan paradigma terutama di kalangan Pemerintah dan Provider. Itulah sebabnya pelayanan KB harus dilaksanakan atas dasar kesukarelaan, keterbukaan dan kejujuran. Pemerintah dan Provider lainnya perlu memiliki kemampuan untuk menjelaskan setiap alat kontrasepsi secara benar dan lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan, disamping harus mengikuti standar pelayanan yang telah ditentukan, dengan demikian calon peserta KB akan terbebas dari pengaruh petugas dalam mentukan dan memilih jenis alat dan obat kontrasepsi yang paling cocok untuk dirinya. Implikasinya, masyarakat harus memperoleh informasi yang benar, jujur dan terbuka meskipun tingkat pengetahuan masyarakat sudah tinggi namun baru sebatas manpu menyebut jenis alat dan obat kontrasepsi tetapi belum dapat menjelaskan afek samping, kontra indikasi, kelebihan dan kekurangannya. Padahal informasi ini sangat penting dipahami sebelum memutuskan menggunakan alat kontrasepsi tertentu meskipun pemerintah, organisasi provesi dan swasta telah menyediakan berbagai tempat pelayanan KB namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses kepada pusat – pusat pelayanan tersebut.

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB sebagai berikut :

1. Masalah partisipasi masyarakat yang masih rendah untuk mengikuti pelayanan KB karena para calon akseptor canggung untuk melakukan Pemeriksaan Infeksi Visual Akseptor (IVA) dengan solusinya melakukan edukasi dan advokasi bagi para calon akseptor.
2. Rasio petugas penyuluh lapangan yang belum 1:3 (1 penyuluh lapangan terhadap 3 desa binaan), dengan solusinya mengotimalisasi sumber daya yang ada melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta koordinasi lintas sektor terkait.

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Akseptor KB	Akseptor	2.443	2.821	2.355	83,48	14.403
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	13.282	19.644	15.507	78,94	17.790
3	Presentase KB Aktif	%	70.39	70,71	78.62	111,19	87
	Rata – rata					**91,20**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB pada tahun 2019 sebesar 91,20%, sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB"*** adalah **91,20%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1) Indikator Akseptor KB.

   Jumlah Akseptor KB di Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebanyak 2.355 akseptor. Capaian Akseptor KB tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebanyak 2.821 akseptor maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 83,48%.

   Capaian kinerja Akseptor KB tahun 2019 sebanyak 2.355 akseptor jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebanyak 2.443 akseptor maka menunjukan bahwa terjadi penurunan jumlah akseptor KB sebanyak 88 akseptor sehingga mengalami penurunan kinerja sebesar 3,60%.

Capaian kinerja Akseptor KB tahun 2019 sebanyak 2.355 akseptor jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 maka menunjukan bahwa belum mencapai target kinerja yaitu sebanyak 14.403 akseptor.

2) Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

Capaian kinerja Jumlah PUS tahun 2019 sebanyak 15.507 PUS jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebanyak 19.644 PUS maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 78,94%.

Capaian kinerja Jumlah PUS tahun 2019 sebanyak 15.507 PUS jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebanyak 13.282 PUS maka menunjukan bahwa meningkatnya jumlah PUS sebanyak peningkatan kinerja sebanyak 2.225 PUS sehingga melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan pencapaian kinerja sebesar 116,75%.

Capaian kinerja Jumlah PUS tahun 2019 sebanyak 15.507 PUS jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 sebanyak 17.790 akseptor maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 87,17%.

3) Prosentase KB Aktif.

Prosentase KB Aktif di Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebanyak 78,62%. Capaian Prosentase KB Aktif tahun 2019 sebanyak 78,62%. jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebanyak 70,71% maka telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 111,19%.

Capaian kinerja Prosentase KB Aktif tahun 2019 sebanyak 78,62% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebanyak 70,39% maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 111,69%.

Capaian kinerja Prosentase KB Aktif tahun 2019 sebanyak 78,62% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 sebanyak 87% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 90,37%

Tabel 3.27
Program dan Anggaran Pendukung Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB

Program	Anggaran		
	Jumlah (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
1. Program Keluarga Berencana	3.702.836.343	3.177.045.191	85,80
2. Program Pelayanan Kontrasepsi	25.000.000	24.644.020	98,58
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Evaluasi (KIE)/Advokasi KB	705.780.000	632.962.500	89,68
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses Pelayanan KB yang berkualitas	939.180.000	863.769.500	91,97
Jumlah	**5.372.796.343**	**4.698.421.211**	**87,45**

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB pada tahun 2019 sebanyak 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp.5.372.796.343,- (*Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.4.698.421.211,- (*Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*) atau sebesar 87,45%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 87,45% jika dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2019 sebesar 91,20%, maka terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mengikuti Program Keluarga Berencana;
3. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia tenaga penyuluh; dan
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana program KB.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi;
2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya Program Keluarga Berencana;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia tenaga penyuluh; dan
4. Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana program KB.

SASARAN 4	**Meningkatnya Jumlah dan Mutu Tenaga Medis dan Para Medis**

Sasaran ini diarahkan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan melalui mutu dan jumlah tenaga kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan dalam bentuk Jaminan pelayanan tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun paramedis pada tempat tempat pelayanan

kesehatan Rumah sakit, Puskesmas dan pustu bahkan pada Posyandu yang ada.

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Jumlah dan Mutu Tenaga Medis dan Para Medis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Jumlah Dokter	Org	35	35	49	140,00	35
2	Jumlah Bidan/ Perawat	Org	217	217	368	169,59	217
	Rata-rata					**154,80**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah dan Mutu Tenaga Medis dan Para Medis pada tahun 2019 sebesar 154,80% sehingga capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Jumlah dan Mutu Tenaga Medis dan Para Medis"*** adalah **154,80%** atau di kategorikan **Sangat Berhasil.**

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah dokter.

   Capaian Jumlah Dokter tahun 2019 sebanyak 49 orang jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebanyak 35 orang maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 140,00%.

   Capaian kinerja Jumlah Dokter tahun 2019 sebanyak 49 orang jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebanyak 35 orang maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 140%.

   Capaian kinerja Jumlah Dokter tahun 2019 sebanyak 49 orang jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 sebanyak 35 orang maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 140,00%.

2. Jumlah Bidan/Perawat.

   Capaian Jumlah Bidan/Perawat tahun 2019 sebanyak 368 orang jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebanyak 217 orang maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 169,59%.

   Capaian kinerja Jumlah Bidan/Perawat tahun 2019 sebanyak 368 orang jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebanyak 217 orang maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 169,59%.

   Capaian kinerja Jumlah Dokter tahun 2019 sebanyak sebanyak 368 orang jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 sebanyak 217 orang maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 169,59%.

Meskipun demikian secara kuantitas terus ditingkatkan dan juga kualitas tenaga medis dan para medis termasuk dokter spesialis untuk mewujudkan peningkatan status RSUD Ba'a dari Tipe D menjadi Rumah Sakit Tipe C. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter di Kabupaten Rote Ndao juga telah diberikan beasiswa Kedokteran bagi mahasiswa kedokteran yang ingin mengabdi di Rote Ndao baik dokter umum maupun dokter spesialis.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan para medis.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, maka langkah yang ditempu adalah peningkatan alokasi anggaran pemberian beasiswa bagi putra-putri daerah yang menjalani pendidikan tinggi di bidang kesehatan dan peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan para medis melalui Diklat teknis/fungsional.

SASARAN 5	Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran ini diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao melalui peningkatan standar layak hidup yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya multidimensi seperti tidak mencukupinya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya kesempatan produktif dan tidak mencukupinya perlindungan sosial.

Aspek perlindungan sosial menjadi salah satu faktor yang penting yang menjadi perhatian prioritas Pemerintah Kabupaten Rote Ndao karena perlindungan sosial yang cukup akan melindungi masyarakat dari guncangan sosial yang dapat menyebabkan seseorang jatuh kedalam kemiskinan ketika terjadi bencana, sakit ataupun krisis ekonomi. Hal ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Tabel 3.29
Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2018-2019

Tahun	Penduduk	Penduduk Miskin	
		Jumlah	%
2018	165.807	90.341	54,49
2019	172.104	89.786	52,17

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.Rote Ndao, Tahun 2020

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao dengan total jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 90.341 orang (54,49%) pada tahun 2019 turun menjadi sebanyak 89.786 orang (52,17%)

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Persentasi Penurunan Penduduk Miskin	%	54,49	54,49	52,17	104,26	23,09
Rata – rata						**104,26**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Persentasi Penurunan Penduduk Miskin pada tahun 2019 sebesar 52,17% dengan capaian kinerja sebesar 104,26%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ***"Menurunnya Angka Kemiskinan"*** adalah **104,26%** atau di kategorikan **Sangat Berhasil.**

Capaian kinerja Persentasi Penurunan Penduduk Miskin pada tahun 2019 sebesar 52,17% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 54,49% maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 104,26%.

Capaian Persentasi Penurunan Penduduk Miskin pada tahun 2019 sebesar 52,17% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 54,49% maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja dengan pencapaian sebesar 104,26%.

Capaian kinerja Persentasi Penurunan Penduduk Miskin pada tahun 2019 sebesar 52,17% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 23,09% maka menunjukan bahwa belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar -25,94%.

Tabel 3.31
Program dan Anggaran Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kemiskinan

NO.	Program	Anggaran	Realisasi	
			Jumlah	%
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	230.000.000	215.370.700	**93,64**
2.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	600.000.000	600.000.000	**100**
Jumlah		**830.000.000**	**815.370.700**	**98.24**

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) program dengan total anggaran sebesar Rp.830.000.000,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.815.370.700,- (*Delapan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) atau sebesar 98,24%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 98,24% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 104,26%, maka menunjukan bahwa belum terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih rendahnya produktivitas masyarakat terkhususnya di sektor pertanian, perikanan dan peternakan yang disebabkan oleh kondisi alam/iklim kemarau yang panjang; dan

3. Masih rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan lintas sektor/instansi terkait penggulangan kemiskinan; dan
2. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sumberdaya guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

SASARAN 6	**Menurunnya Angka Pengangguran**

Sasaran ini diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Rote Ndao melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja agar memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dewasa ini. Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase dari individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki perkerjaan. Seseorang dianggap menjadi penganggur jika tidak bekerja namun masih menunggu untuk mendapatkan pekerjaan.

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Pengangguran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Presentase Penurunan Jumlah Pengangguran	%	2,11	2,83	2,73	103,53	2,83
Rata – rata						**103,53**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Presentase Penurunan Jumlah Pengangguran pada tahun 2019 sebesar 2,73% dengan capaian kinerja sebesar 103,53%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ***"Menurunnya Angka Pengangguran"*** adalah **103,53%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil.**

Capaian kinerja Presentase Penurunan Jumlah Pengangguran pada tahun 2019 sebesar 2,73% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 2.83% maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 103,53%.

Capaian kinerja Presentase Penurunan Jumlah Pengangguran pada tahun 2019 sebesar 2,73% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 2,11% maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan Presentase Pengangguran sebesar 0,62% sehingga terjadi penurunan kinerja sebesar 29,38%.

Capaian kinerja Penurunan Jumlah Pengangguran pada tahun 2019 sebesar 2,73% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar 2,83% maka menunjukan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 0,10% dengan peningkatan kinerja sebesar 103,53%.

Tabel 3.33
Program dan Anggaran Pendukung Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran

Program	Anggaran		
	Jumlah (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	245.000.000	242.375.100	98,93
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	50.000.000	47.327.500	94,66
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	274.494.000	266.104.400	96.94
Jumlah	**569,494,000**	**555,807,000**	**97,60**

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Pengangguran pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) program dengan total anggaran sebesar Rp.569.494.000,- (*Lima Ratus Enam Puluh Embilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terealisasi sebesar Rp.555.807.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah*) atau sebesar 97,60%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 97,60% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 103,53%, maka terjadi efisiensi sumber daya yang sangat signifikan dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kerja;

3. Masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; dan
4. Masih tersedianya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor/instansi terkait;
2. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja melalui Diklat kompetensi/ketrampilan/skil kewirausahaan;
3. Peningkatan aokasi anggaran di bidang ketenagakerjaan; dan
4. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).

MISI VI	:	**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.**

SASARAN 1	**Meningkatnya Kinerja Aparatur Sesuai Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Sasaran ini diarahkan pada upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas pelayanan publik yang unggul dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menempatkan penerima layanan publik bukan sekedar sebagai konsumen tetapi sebagai warga negara yang memiliki berbagai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam konstitusi.

Tabel 3.34
Jumlah Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun 2018 – 2019

NO.	JENIS IJIN	Jumlah	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1	Advice Plan	92	106
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	224	236
3	Izin Gangguan (HO)	291	0

4	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	110	372
5	Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB)	24	36
6	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	26	56
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	54	98
8	Tanda Daftar Industri (TDI)	4	1
9	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	0
10	Izin Trayek	2	2
11	Surat Izin Usaha Pariwisata (SIUPar)	16	23
12	Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUPMB)	0	0
13	Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2)	0	0
14	Surat Izin Apotek	0	3
15	Surat Izin Depo Obat Hewan	0	1
16	Izin klinik/Balai pengobatan	0	1
17	Izin Prinsip (IP)	0	17
18	Izin Lokasi	0	11
19	Izin Lingkungan (IL)	0	6
20	Izin Operasional Pendidikan Formal	8	8
21	Izin Operasional Pendidikan Non Formal	0	0
22	Rekomendasi Penelitian	161	145
23	Keterangan Selesai Penelitian	62	62
TOTAL		**1074**	**1184**

Sumber :Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

Tabel diatas menunjukan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berupa perizinan dan non perzinan pada tahun 2018 sebanyak 1.074 perizinan/non perizinan dan pada tahun 2019 sebanyak 1.184 perizinan/non perizinan.

Tabel 3.35
Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 dan 2019

NO.	Tahun	Target	Realisasi	
			Jumlah	%
1	2018	1.296	1.074	82,87
2	2019	1.200	1.184	98,67

Sumber :Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Rote Ndao, Tahun 2020

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa pelayanan perizinan terpadu tahun 2018 sebesar 82,87% dari target yang ditetapkan dan tahun 2019 sebesar 98,67% dari target yang ditetapkan. Presentase pelayanan tahun 2018 sebesar 82,87% jika dibandingkan dengan Presentase pelayanan tahun 2019 sebesar 98,67% maka menunjukan peningkatan kinerja pelayanan sebesar 15,8%.

Tabel 3.36
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kinerja Aparatur Sesuai Prinsip *Good Governance*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Realisasi		
1	Prosentase Pelayanan Perijinan Satu Pintu	%	82,87	100	98,67	98,67	100
Rata – rata						**98,67**	

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Presentase Pelayanan Perijinan Satu Pintu di Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebesar 98,67%, sehingga capaian kinerja sasaran "***Meningkatnya Kinerja Aparatur Sesuai Prinsip Good Governance***" adalah **98,67%** atau dikategorikan "**Sangat Berhasil**"

Capaian prosentase Pelayanan Perijinan Satu Pintutahun 2019 sebesar 98,67% jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100 maka belum mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 98,67%.

Capaian kinerja Prosentase Pelayanan Perijinan Satu Pintutahun 2019 sebesar 98,67% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebanyak 82,87% maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar15,80%.

Capaian kinerja Prosentase Pelayanan Perijinan Satu Pintu tahun 2019 sebesar 98,67% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun

2019 sebesar 100% maka menunjukan bahwa belum mencapai target kinerja dengan pencapaian kinerja sebesar 98,67%

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Kegiatan Pendataan dan Penertiban Perijinan dan Non Perijinan dengan dukungan dana sebesar Rp.150.000.000,- *(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)*, terealisasi sebesar Rp.149.960.000,- *(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)* atau sebesar **99,97%.** Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 99,97% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 98,67%, maka menunjukan bahwa belum terjadi efisiensi sumber daya pencapaian kinerja sasaran. Faktor yang sangat mempengaruhi capaian kinerja ini adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur teknis pada bidang perizinan/non perizinan serta sarana dan prasarana pelayanan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor terkait pelayanan publik;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia aparatur;
3. Masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah; dan
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor terkait pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia aparatur;
3. Alokasi pembiayaan pemerintah bagi program dan kegiatan prioritas daerah; dan
4. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana.

SASARAN 2	**Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat**

Sasaran ini diarahkan untuk memfasilitasi peningkatan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) masyarakat melalui penyuluhan hukum guna menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM).

Pelaksanaan Sosialisasi Sadar Hukum tahun 2019 diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukumdi tingkat kecamatan, antara lain :

1. Kecamatan Lobalain;
2. Kecamatan Rote Barat Laut
3. Kecamatan Rote Barat Daya;
4. Kecamatan Rote Barat;
5. Kecamatan Rote Tengah;
6. Kecamatan Pantai Baru;
7. Kecamatan Rote Timur;
8. Kecamatan Rote Selatan;
9. Kecamatan Landu Leko; dan
10. Kecamatan Ndao Nuse

Tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sadar Hukum adalah meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Adapun materi sosialisasi/penyuluhan sadar hukum dimaksud adalah :

1. Sosialisasi Elektronik Surat Keterangan (eSurketra) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Peran Kodim 1627/RN dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Wilayah Rote Ndao; dan
3. Peran Kejaksaan dalam Membina Pembangunan di Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Jumlah Sosialisasi Sadar Hukum	Sosialisasi	1	1	1	100	1
Rata – Rata						**100**	

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Jumlah Sosialisasi Sadar Hukum di Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kegiatan sosialisasi. Capaian kinerja Jumlah Sosialisasi Sadar Hukum tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kegiatan sosialisasi maka menunjukan bahwa mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sasaran "***Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat***" adalah **100%** atau dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Capaian kinerja Jumlah Sosialisasi Sadar Hukum tahun 2019 sebanyak1 (satu) kegiatan sosialisasi jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebanyak1 (satu) kegiatan sosialisasi maka menunjukan bahwa telah mencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Sosialisasi Sadar Hukum tahun 2019 sebanyak1 (satu) kegiatan sosialisasi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

tahun 2019 maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum. Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.134.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)*, terealisasi sebesar Rp.134.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)* atau sebesar 100%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya yang signifikan dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia aparatur;
2. Masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah; dan
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia aparatur;
2. Masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah di budang hokum dan HAM; dan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung.

SASARAN 3	**Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Pembangunan**

Sasaran ini diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat akan pentingnya *IT (information technology)*/teknologi informasi dan mendorong masyarakat untuk merasa memiliki pembangunan sebagai *entry point* bagi masyarakat guna melakukan kontrol public (*check and*

balancing) terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao. Dukungan kontrol publik akan efektif jika publik mendapatkan akses informasi yang cukup. Untuk itu, masyarakat harus selalu diberi ruang yang cukup untuk melakukan tindakan koreksi terhadap kebijakan publik yang komprehensif disertai solusi yang tepat melalui informasi yang lengkap dan utuh. Penyebarluasan informasi pembangunan dan layanan pemerintah daerah melalui Website Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (*http://www.rotendaokab.go.id/*) merupakan salah satu upaya penerapan e-Government guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. .

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Jumlah Pengunjung Website Rote Ndao	Orang	29.169	1.000	1.386	138,60	1.000
Rata – rata						**138,60**	

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Presentase Capaian Jumlah Pengunjung Website Rote Ndao pada tahun 2019 sebanyak 1.386 orang dengan capaian kinerja sebesar 138,60%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Pembangunan"*** adalah **138,60%** atau di kategorikan **Sangat Berhasil.**

Capaian kinerja Jumlah Pengunjung Website Rote Ndao pada tahun 2019 sebanyak 1.386 orang jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebanyak 1.000 orang maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 138,60%.

Capaian kinerja Jumlah Pengunjung Website Rote Ndao pada tahun 2019 sebanyak 1.386 orang jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 29.169 orang maka menunjukan bahwa mengalami penurunan kinerja sebesar 95,25%.

Capaian kinerja Jumlah Pengunjung Website Rote Ndao pada tahun 2019 sebanyak 1.386 orang jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebanyak 1.000 orang maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 138,60%.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media melalui Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.347.650.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Kima Puluh Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.341.948.638,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar 98,36%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 98,36% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 138,60%, maka menunjukan bahwa terjadi efisiensi sumber daya yang signifikan dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka penyediaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia pengelolaan Website;
3. Masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah bagi pengembangan dan pengelolaan Website; dan

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan dan dan pengelolaan Website.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka pengembangan jaringan teknologi informasi secara terpadu dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia di bidang Teknologi Informasi;
3. Peningkatan alokasi anggaran guna pengembangan jaringan teknologi informasi secara terpadu dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
4. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan jaringan teknologi informasi secara terpadu dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SASARAN 4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Sasaran ini diarahkan untuk mengoptimalisasikan sumber-sumber penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rote Ndao bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Tabel 3.39
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2019

PENDAPATAN ASLI DAERAH	Capaian Realisasi (Rp)		Peningkatan/ (Penurunan) %
	2018	2019	
Pajak Daerah	8.947.453.523,00	9.449.920.890,95	105,62
Retribusi Daerah	4.393.370.494,00	4.894.896.494,00	111,42

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.505.647.812,00	6.059.453.988,00	110,06
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.977.556.086,14	11.059.131.435,17	123,19
TOTAL	**27.824.027.915,14**	**31.463.408.808,12**	**113,08**

Sumber : Badan Pendapatan Kab.Rote Ndao, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi PAD pada tahun anggaran 2019 jika dibandingkan dengan capaian realisasi PAD tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp.31.463.408.808,12 (*Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah Dua Belas Sen*) atau sebesar 113,08%, hal tersebut karena pencapaian realisasi Pajak Daerah sebesar 105,62%, Retribusi Daerah sebesar 111,42%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 110,06 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar 123,19%.

Tabel 3.40
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Real.		
1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	27.824.027.915,14	28.779.975.967,25	31.463.408.808,12	109,32	28.779.975.967,25
Rata – rata						**109,32**	

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja Jumlah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp.31.463.408.808,12 (*Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah Dua Belas Sen*) dengan capaian kinerja sebesar 109,32%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya***

Pendapatan Asli Daerah" adalah **109,32 %** atau di kategorikan **Sangat Berhasil.**

Capaian kinerja Jumlah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp.31.463.408.808,12 (*Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah Dua Belas Sen*) jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 sebesar Rp.28.779.975.967,25 (*Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Lima Sen*) maka menunjukan bahwa telah mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 109,32%.

Capaian kinerja Jumlah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp.31.463.408.808,12 (*Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah Dua Belas Sen*) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar Rp.27.824.027.915,14 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah Empat Belas Sen)* maka menunjukan bahwa terjadi peningkatan kinerja sebesar 113,08%.

Capaian kinerja Jumlah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp.31.463.408.808,12 (*Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah Dua Belas Sen*) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019 sebesar Rp.28.779.975.967,25 (*Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Lima Sen*) maka maka menunjukan bahwa telah melampaui target dengan pencapaian kinerja sebesar 109,32%.

Program yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.1.679.497.358,- (*Satu*

MiliarEnam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), terealisasi sebesar Rp.1.637.385.328,- (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar 97,49%. Realisasi anggaran sebesar 97,49% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 109,32%, maka terjadi efisiensi sumber daya yang sangat signifikan dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya motivasi dan kesadaran wajib pajak/retribusi untuk membayar Pajak/Retribusi;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia di bidang pendapatan daerah;
3. Masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; dan
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan motivasi dan kesadaran wajib pajak/retribusi untuk membayar Pajak/Retribusi melalui kegiatan Sosialisasi dan Pekan Panutan Sadar Pajak;
2. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia di bidang pendapatan daerah;
3. Peningkatan alokasi anggaran bagi upaya peningkatan pendapatan asli daerah; dan
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

SASARAN 5	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah

Sasaran ini diarahkan untuk mendorong penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam pelaksanaan tugas aparatur menuju opini WTP (*Wajar Tanpa Pengecualian*). Opini didasarkan atas hasil audit/pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didasarkan pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil audit tersebut berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan penatausahaan dan pengelolaan Aset Daerah.

Tabel 3.41
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Target Akhir RPJMD 2019
				Target	Realisasi		
1	Opini BPK Terhadap Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini	WDP	WDP	WDP	100	WTP
Rata – rata						**100**	

Catatan :
1. Apabila Target kinerja adalah Opini WTP, maka :
   - Apabila realisasinya adalah Opini Disclaimer, maka capaian 100%/3 = 33,33%, karena berada dua level dibawah target WTP (terendah);
   - Apabila realisasinya adalah Opini WDP, maka capaian 66,67% karena berada satu level dibawah target WTP;
   - Apabila realisasinya adalah Opini WTP, maka capaian 100% karena sesuai target WTP
2. Apabila Target kinerja adalah Opini WTD, maka :
   - Apabila realisasinya adalah Opini Disclaimer, maka capaian 150% karena berada satu level diatas target WDP;
   - Apabila realisasinya adalah Opini WDP, maka capaian 100% karena sesuai target WDP;
   - Apabila realisasinya adalah Opini WTP, maka capaian 50% karena berada satu level dibawah target WDP.

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Opini BPK Terhadap Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah tahun 2019 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Capaian kinerja Opini WDP pada tahun 2019 jika dibandingan dengan target tahun 2019 yaitu Opini WDP maka

menunjukan bahwa mencapai target dengan pencapaian kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sasaran *"**Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah**"* adalah **100%** atau dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Capaian kinerja Opini BPK Terhadap Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah tahun 2019 yaitu Opini WDP jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 maka menunjukan bahwamencapai target kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pencapaian Opini WDP.

Capaian kinerja Opini BPK Terhadap Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah tahun 2019 yaitu Opini WDP jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 maka menunjukan bahwa belum mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu Opini WTP.Meskipun demikian upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas penataan dan pengelolaan asset daerah menjadi skala prioritas untuk mencapai Opini WTP.

Tabel 3.42
Program dan Anggaran Pendukung Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah

Program	Anggaran		
	Jumlah (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	380.000.000	322.033.300	84,75
2. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.039.450.000	2.778.802.266	91.42
3. Perencanaan Pembangunan Daerah	336.290.000	327.272.846	97,32
Jumlah	**3.755.740.000**	**3.428.108.412**	**91,28**

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Pengangguran pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) program dengan total anggaran sebesar Rp.3.755.740.000,- (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terealisasi sebesar Rp.3.428.108.412 (*Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah*) atau sebesar 91,28%. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 91,28% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, maka terjadi efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini diantaranya adalah :

1. Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka penataan dan pengelolaan aset;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia pengelola aset;
3. Masih terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah bagi pengembangan sistem penataan dan pengelolaan aset daerah; dan
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan sistem penataan dan pengelolaan aset daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan ditempuh langkah - langkah yaitu :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor dalam rangka penataan dan pengelolaan aset;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia pengelola aset;
3. Peningkatan alokasi anggaran bagi pengelolaan aset daerah; dan
4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan aset daerah.

B. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Berdasarkan uraian analisis pada bagian sebelumnya maka pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.43
Pencapaian Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

NO	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
MISI I	**MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH KE DALAM UNIT-UNIT OPERASIONAL YANG TEPAT DARI SISI EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN KEAMANAN NEGARA**		
1.	Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sesuai Kaidah Tata Ruang	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Daya Dukung Lahan	97,16	Sangat Berhasil
3	Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman Layak Huni Dan Produktif	158	Sangat Berhasil
MISI II	**MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SERTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**		
4.	Tersedianya Sarana dan Prasrana Transportasi Publik Yang memadai Secara Kualitas & Kuantitas	98,78	Sangat Berhasil
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Jaringan Irigasi Teknis	123,58	Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih dan Sanitasi Layak	78,05	Berhasil

MISI III	**MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING**		
7.	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	99,95	Sangat Berhasil
8.	Meningkatnya Mutudan Prosentase Kelulusan	100	Sangat Berhasil
9.	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Non Formal	100,43	Sangat Berhasil
10.	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Perpustakaan	100	Sangat Berhasil
11.	Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan	100	Sangat Berhasil
12.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	100	Sangat Berhasil
13.	Meningkatnya Perlindungan Anak	100	Sangat Berhasil
14.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dalam Segala Bidang baik Lokal, Regional Maupun Nasional	85,00	Berhasil
MISI IV	**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DI DUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN**		
15.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertaniandan Perikanan	93,92	Sangat Berhasil
16.	Meningkatnya Sarana dan Prasaran Pariwisata	280,45	Sangat Berhasil
17.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	105,06	Sangat Berhasil
18.	Meningkatnya Jumlah Industri Berbasis Pertanian	523,08	Sangat Berhasil

19.	Meningkatnya Jumlah dan Mutu Koperasi yang sehat	102,82	Sangat Berhasil
MISI V	**MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**		
20.	Menurunnya Gizi Buruk	76,31	Berhasil
21.	Menurunnya angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit	82,01	Berhasil
22.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB	91,20	Sangat Berhasil
23.	Meningkatnya Jumlah dan Mutu Tenaga Medis dan Paramedis	154,80	Sangat Berhasil
24.	Menurunnya Angka Kemiskinan	104,26	Sangat Berhasil
25.	Menurunnya Angka Pengangguran	103,53	Sangat Berhasil
MISI VI	**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**		
26.	Meningkatnya Kinerja Aparatur sesuai Prinsip-prinsip *Good Governance*	98,67	Sangat Berhasil
27.	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	100	Sangat Berhasil
28.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Pembangunan	138,60	Sangat Berhasil
29.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	109,32	Sangat Berhasil
30.	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	100	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		**123,50**	**Sangat Berhasil**

Berdasarkan ketercapaian setiap indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, maka hasil pencapaian indikator sasaran sebanyak 30 (tiga puluh) sasaran dengan 65 (enam puluh lima) indikator kinerjamenunjukan bahwa

rata-rata realisasi capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 sebesar **123,50%** sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**, yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) indikator sasaran dikategorikan **Sangat Berhasil** dan sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran dikategorikan **Berhasil**.

Hal ini menunjukan bahwa apa yang telah ditargetkan dalam RPJMD, RKPD maupun APBD serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019 di Kabupaten Rote Ndao terlaksana dengan baik sesuai target yang diharapkan. Keberhasilan atas pencapaian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2019.

C. REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalan kurun waktu satu tahun. Adapun kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 sesuai keadaan Januari 2019, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.44
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

NO. REK	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)	%
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN**	**816.174.430.483,25**	**812.545.255.595,12**	**99,56**
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**28.779.975.967,25**	**31.463.408.808,12**	**109,32**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.118.669.051,00	9.449.920.890,95	**116,40**
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.290.013.000,00	4.894.896.494,00	**77,82**
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.059.453.988,00	6.059.453.988,00	**100,00**
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.311.839.928,25	11.059.137.435,17	**133,05**
4,2	**DANA PERIMBANGAN**	**642.335.059.000,00**	**628.610.869.733,00**	**97,86**
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8.265.338.000,00	6.537.826.650,00	**79,10**
4.2.2	Dana Alokasi Umum	461.383.019.000,00	461.383.019.000,00	**100,00**
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	172.686.702.000,00	160.690.024.083,00	**93,05**
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**145.059.395.516,00**	**152.470.977.054,00**	**105,11**
1.3.1	Pendapatan Hibah	23.212.800.000,00	30.812.440.000,00	**132,74**
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.053.369.516,00	17.264.139.054,00	**101,24**
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104.793.226.000,00	104.394.398.000,00	**99,62**
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	0,00	
1.3.6	Pendapatan Lainnya		0,00	
5	**BELANJA**	**878.457.620.489,26**	**812.978.878.248,60**	**92,55**
5,1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**450.467.987.258,26**	**426.389.739.957,00**	**94,65**
2.1.1	Belanja Pegawai	272.856.041.892,26	259.629.007.120,00	**95,15**
2.1.3	Belanja Subsidi	6.988.800.000,00	0,00	-
2.1.4	Belanja Hibah	7.526.600.000,00	7.409.300.000,00	**98,44**
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.345.000.000,00	4.315.000.000,00	**99,31**

2.1.6	Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1.440.868.200,00	1.239.152.800,00	**86,00**
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	153.784.916.800,00	153.086.058.734,00	**99,55**
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.525.760.366,00	711.221.303,00	**20,17**
5,2	**BELANJA LANGSUNG**	**427.989.633.231,00**	**386.589.138.291,60**	**90,33**
5.2.1	Belanja Pegawai	40.860.405.044,00	37.015.808.208,00	**90,59**
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.269.809.395,00	176.103.326.250,83	**88,82**
5.2.3	Belanja Modal	188.859.418.792,00	173.470.003.832,77	**91,85**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(62.283.190.006,01)**	**(433.622.653,48)**	**0,70**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**68.283.190.006,01**	**68.281.820.006,01**	**100,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	68.283.190.006,01	68.281.320.006,01	**100,00**
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		500.000,00	
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**6.000.000.000,00**	**5.500.000.000,00**	**91,67**
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	5.500.000.000,00	**91,67**
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	PEMBIAYAAN NETTO	**62.283.190.006,01**	**62.781.820.006,01**	**100,80**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**62.348.197.352,53**	

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 merupakan akumulasi kerja keras dari seluruh masyarakat Rote Ndao. Kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan sebelumnya dengan target yang ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* sebagai ujung tombak pembangunan. Hasil pencapaian indikator sasaran sebanyak 30 (tiga puluh) sasaran dengan 65 (enam puluh lima) indikator kinerja menunjukan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 sebesar 123,50% sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**, yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) indikator sasaran dikategorikan **Sangat Berhasil** dan sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran dikategorikan **Berhasil**.

Berbagai kemajuan telah diraih dengan capaian kinerja yang dinilai berhasil. Namun demikian tidak dapat dipungkiri masih banyak masalah dan kendala yang perlu dan terus dibenahi. Selain itu, pembenahan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ditingkat Perangkat Daerah terus dilakukan agar dengan perencanaan kinerja yang baik dan pelaksanaan system pengukuran kinerja yang efektif serta melakukan evaluasi kinerja yang menyeluruh dengan perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan kemajuan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao akan terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 selain menjadi media pertanggungjawaban kepada Pemberi Kewenangan (Pemerintah Pusat) maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 juga merupakan

pertanggungjawaban kepada publik terhadap informasi kinerja pembangunan yang sudah dilakukan dalam tahun bersangkutan.

Penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 terlaksana berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan seluruh instansi terkait yang telah memberikan data dan informasi mengenai pencapaian kinerja dan hasil pembangunan di Kabupaten Rote Ndao.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dapat memberikan kesejahteraan pada rakyat dan mendorong etos kerja yang tinggi dan dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Dengan demikian mutu layanan yang berkualitas dapat tercapai dan terciptanya kesejahteraan bersama.

Ba'a, 11 Maret 2019

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU, SE

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
I N S P E K T O R A T
Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jl.Lekunik Telp/Fax (0380) 8571095 website : www.rotendadokab.go.id

PERNYATAAN REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan vailid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atas hal – hal yang menimbulkan perbedaan dan meyakini keadaan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Baa, 18 Maret 2020

INSPEKTUR,

PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT ROTE NDAO

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650808 199303 1 011